

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pertanggungjawaban tersebut kepada yang memberikan amanah yaitu masyarakat dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2015 adalah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 maupun yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang diukur melalui formulir Pengukuran Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 53 Tahun 2014.

A. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, maka diperlukan evaluasi akuntabilitas kinerja sektor publik secara periodik. Meskipun evaluasi akuntabilitas dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan *Self assessment*, setidaknya-tidaknya memberikan gambaran kondisi kinerja

yang dapat digunakan sebagai data pengawasan/pengendalian dan peningkatan kualitas kinerja.

Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 adalah pelaporan pencapaian target-target dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015 untuk tahun keempat yang diukur dengan indikator-indikator kinerja yang bersifat *outcome* (utamanya) yang telah disusun berdasarkan arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam program-program kegiatan-kegiatan sesuai sumber daya input dan potensi serta kemampuan daerah.

Mendasarkan kepada ruang lingkup evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja tersebut, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dapat dikemukakan sebagai berikut yang dikelompokkan berdasarkan misi yang ingin diwujudkan.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 yang membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator sasaran per Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Misi Pertama **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik “**

Sasaran Pertama : Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat

a. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS.

Realisasi indikator kinerja Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS tahun 2015 sebesar 13 kasus atau 61,5 % dari target yang ditentukan. Realisasi tersebut menurun dari realisasi tahun 2014 yaitu sebesar 10 kasus. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 100% tertangani. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Menurunnya Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS.	- Hukuman Disiplin tingkat berat = 14 org - Hukuman Disiplin rendah berat = 9 org	- Hukuman Disiplin tingkat berat = 9 org - Hukuman Disiplin tingkat sedang = 1 org	Hukuman Disiplin tingkat berat sebanyak 10 orang	10 kasus (100% tertanga ni)	8 Kasus (100% tertanga ni)	13 kasus (100% tertanga ni)	61,5

Realisasi tahun 2011 jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang tertangani sebanyak 23 kasus (hukuman disiplin tingkat berat sebanyak 14 orang dan disiplin sedang sebanyak 9 orang) sedangkan jumlah kasus pada tahun 2012 mengalami penurunan yaitu yang tertangani 10 kasus (hukuman disiplin tingkat berat sebanyak 9 orang dan disiplin sedang sebanyak 1 orang) mengalami penurunan yaitu sebanyak 13 kasus atau sebesar 56,52% dan selanjutnya jika dibandingkan tahun 2013 jumlah kasus yang tertangani mencapai sebanyak 10 kasus. Realisasi tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2012 . pada tahun 2015 realisasinya adalah terdapaat 13 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Kabupaten Purbalingga.

Konsistensi terhadap disiplin pegawai merupakan unsur penting dalam menjaga kinerja profesionalisme pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Citra PNS khususnya PNS yang saat ini memiliki etos kerja rendah maka berujung pada tingkat disiplin yang rendah pula. Untuk itu dengan upaya pemberian sanksi terhadap para pegawai yaang melanggar peraturan dapat dijadikan indikator konsistensi terhadap penegakan disiplin pegawai. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian adalah cukup kompleks, sehingga diperlukan adanya kesiapan aparatur pelaksananya. Untuk mengatasinya maka diperlukan

fasilitasi kepegawaian untuk meningkatkan koordinasi kerjasama dan pada tahun 2014 sudah dilaksanakan pada 40 SKPD.

b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Realisasi indikator kinerja Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Tahun 2015 adalah Baik (77,60) atau 102,10% dari target yang ditentukan. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dari realisasi tahun 2014 yaitu sebesar Baik (74). Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010–2015.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.	Baik (74)	Baik (74)	Baik (76)	Baik (74)	Baik (76)	Baik (77,60)	102,10

Realisasi tahun 2011 indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik adalah dalam kategori Baik dengan nilai 74. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun 2012 dengan kategori baik dengan nilai 74. Pada tahun 2013 realisasinya meningkat 2 poin dengan kategori baik dengan nilai 76. Pada tahun 2015 realisasinya adalah sebesar 77,60 dengan predikat baik.

Perbandingan capaian Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Tahun 2013 terhadap target akhir 2013 sebesar 100%. Oleh karena itu capaian kinerja Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik selalu diukur sendiri oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat setiap tahunnya. Nilai IKM pada Tahun 2013 diperoleh dari nilai rata-rata seluruh

SKPD pemberi pelayanan. Sedangkan nilai IKM tahun 2014 dan 2015 diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh pihak ketiga (LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap SKPD pemberi layanan serta pengukuran mandiri yang dilakukan oleh SKPD yang mengampu pelayanan publik.

c. Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan auditor.

Realisasi indikator kinerja Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan auditor tahun 2015 sebesar 471 temuan atau 80,04 % dari target yang ditentukan. Realisasi tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yaitu sebesar 346 temuan.

Tabel 3.3 Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan auditor	506 temuan	534 temuan	505 temuan	346 temuan	377 temuan	471 temuan	80,04

Realisasi tahun 2011 Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor adalah 506 temuan sedangkan jumlah temuan pada tahun 2012 Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor adalah 534 temuan mengalami peningkatan yaitu sebanyak 107 temuan atau sebesar 24,65%. Realisasi tahun 2013 Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor adalah 505 temuan. Realisasi tahun 2013 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebanyak 29 temuan. Sedangkan realisasi tahun 2014 sebanyak 346 temuan. Pada tahun 2015 realisasinya sebanyak 471 temuan.

Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan antara lain :

1. Objek pemeriksaan atau entitas belum sepenuhnya melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif.
2. Dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah belum sepenuhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Obyek pemeriksaan atau entitas agar melaksanakan sistem pengendalian intern dengan baik dan benar.
2. Dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan mengacu pada Standar akuntansi Pemerintah (SAP).

Sasaran kedua : Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal.

a. Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2015 sebesar tidak ada atau 100% dari target yang ditentukan.

SPM bidang dasar sudah seluruhnya diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012, sebanyak 14 bidang dasar yang diampu oleh :

1. Bidang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan;
2. Bidang Pendidikan Dasar oleh Dinas Pendidikan;
3. Bidang Ketenagakerjaan oleh Dinsosnakertrans;
4. Bidang Sosial oleh Dinsosnakertrans;
5. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri oleh BPBD, Satpol PP dan Dinpendukcapil;
6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera oleh BKBPP;
7. Bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan oleh BKBPP;
8. Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang oleh DPU;
9. Bidang Perumahan Rakyat oleh Bappeda;
10. Bidang Ketahanan Pangan oleh BPPKP;
11. Bidang Kesenian oleh Dinbudparpora;
12. Bidang Perhubungan oleh Dinhubkominfo;
13. Bidang Komunikasi dan Informatika oleh Dinhubkominfo;
14. Bidang Lingkungan Hidup oleh BLH.

Sehingga untuk tahun 2014 tidak ada penambahan jumlah SKPD pengampu bidang dasar sebelum ada penambahan bidang dasar dari kementerian pusat.

Tabel 3.4 Meningkatnya Jumlah SKPD yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	7 SPM	13 SPM	13 SPM	13 SPM	13 SPM	13 SPM	100

Realisasi jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2011 adalah 7 SKPD sedangkan pada tahun 2012 adalah 13 SKPD. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 9 SKPD. Realisasi tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 masih sama dengan realisasi tahun 2012 karena menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

- b. Meningkatnya jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik tahun 2015 sebesar 0 SKPD atau 0% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 1 SKPD. Hal tersebut dikarenakan banyaknya SKPD yang kualifikasinya sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang lagi. Dikarenakan efisiensi anggaran yang dipergunakan untuk memperpanjang kualifikasi menyebabkan banyak SKPD untuk tidak memperpanjang hal tersebut.

Tabel 3.5 Meningkatnya Jumlah SKPD yang Memenuhi Kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam Pelayanan Publik Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	capaian %
Meningkatnya jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik	6 SKPD	6 SKPD	6 SKPD	1 SKPD	6 SKPD	0	0

Realisasi jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik pada tahun 2011 sebanyak 6 SKPD sedangkan pada tahun 2012 6 SKPD. Realisasi tahun 2013 sebanyak 6 SKPD. Realisasi antara tahun 2011 sampai dengan 2013 tidak berubah. Sedangkan realisasi tahun 2014 adalah 1 SKPD. Pada tahun 2015 adalah akhir RPJMD dan capaianannya adalah tidak ada SKPD yang memenuhi kualifikasi standar nasional maupun internasional.

c. Terwujudnya website *e-procurement*.

Realisasi capaian indikator kinerja Terwujudnya website *e-procurement* tahun 2014 sebanyak 1 program yaitu SPSE (Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik) atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama capaian tahun 2013 yaitu sebanyak 100%.

Tabel 3.6 Terwujudnya Website *e-procurement* Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Terwujudnya website <i>e- procurement</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

Realisasi Terwujudnya Website *E-Procurement* tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah 100%. Realisasi tahun 2014 adalah 100%. Realisasi tahun 2015 adalah 100%. Realisasi akhir RPJMD sudah terealisasi semenjak tahun 2011.

Penggunaan SPSE tahun 2011 untuk pengadaan barang/ jasa diatas 100 juta, sedangkan tahun 2013 untuk pengadaan barang/ jasa diatas 200 juta. Semua pengadaan barang/ jasa yang melalui penyedia/ swakelola wajib diumumkan melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Kendala yang dihadapi adalah pada saat lelang yang pelaksanaannya dan pengiriman berkas dari penyedia lelang secara bersama-sama karena waktunya terbatas maka dalam penerimaan akan mengalami keterlambatan.

Sasaran Ketiga : Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu.

Realisasi capaian indikator kinerja Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu tahun 2015 ada dokumen atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar ada dokumen. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah ada dokumen.

Tabel 3.7 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tepat Waktu Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100

Realisasi dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu pada tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah ada dan tepat waktu. Target akhir RPJMD adalah ada.

- b. Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah tahun 2015 adalah 86,28% atau 86,58% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 80,97%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 ditargetkan meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.8 Meningkatnya Efisiensi Penggunaan Input dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah	meningkat	90,16%	94,97%	80,28%	100%	86,58%	86,58%

Realisasi indikator Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah pada tahun 2011 adalah meningkat. Realisasi pada tahun 2012 yaitu 90,16% dan realisasi pada tahun 2013 yaitu 94,97%. Pada tahun tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 4,81%. Capaian tersebut selalu meningkat sampai dengan tahun keempat RPJMD yaitu tahun 2014 sebesar 80,28%. Realisasi tahun 2015 yaitu 86,58%. Dari tahun-ketahun realisasinya cenderung meningkat. Namun, realisasi pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 80,28%.

Kegiatan pemerintah daerah tercermin pada kegiatan yang ada pada SKPD. Kegiatan ini ada di Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga yaitu Kegiatan Pelaksanaan Rakor POK Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan Rakor POK Kabupaten Purbalingga diadakan sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengundang seluruh SKPD untuk melakukan pemaparan hasil progres kegiatan dan mengevaluasi kemajuan fisik kegiatan, baik kegiatan yang sumber dananya berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota dari APBD Provinsi Jawa Tengah, DAK maupun APBD Murni Kabupaten Purbalingga. Sehingga dengan adanya Kegiatan Pelaksanaan Rakor POK maka program dan kegiatan bisa terpantau, termonitoring dan terevaluasi apa yang menjadi hambatan dari progress kegiatan yang ada pada masing-masing SKPD dan mencari solusi penyelesaiannya.

c. Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan tepat manfaat.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan tepat manfaat tahun 2015 adalah 1.822 kegiatan atau 99,55% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 1.820 kegiatan.

Tabel 3.9 Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan tepat manfaat Tahun 2014 (kegiatan)

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan tepat manfaat	Meningkat	98,86%	1.556	1.820	1.830	1.822	99,55

Realisasi indikator Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan tepat manfaat pada tahun 2011 adalah meningkat. Pada tahun 2012 yaitu 98,86% dan pada tahun 2013 sebesar 1.556 kegiatan. Adanya peningkatan pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 sebesar 264 kegiatan. Realisasi capaian kinerja pada tahun 2015 sebanyak 1.822 kegiatan. Capaian selama 5 tahun cenderung meningkat. Capaian ini sudah sesuai yang ditargetkan oleh RPJMD 2010 – 2015. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tahun anggaran 2015 terdapat 1.822 kegiatan dari 174 SKPD dengan jumlah seluruh anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 472.983.494.000,00 dan setelah perubahan Rp. 653.611.844.000,00. Anggaran tersebut bersumber dari dana bantuan keuangan Kabupaten/ Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 pada APBD murni (sebelum perubahan) Rp. 37.925.788.000,00 dan setelah perubahan Rp. 81.168.344.000,00. Adapun realisasi fisik yang dicapai dari dana bantuan keuangan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 68.595.367.514,00 atau 84,49% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar Rp. 12.572.976.486,00 atau 18,49%. Untuk dana DAK besarnya sebelum perubahan sebesar Rp. 60.525.670.000,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 74.609.606.000,00. Realisasi fisik yang dicapai dari bantuan dana DAK sebesar Rp. 61.187.337.881,00 atau 82,01% dengan tingkat efisiensi sebesar Rp. 13.422.268.119,00 atau 17,99%.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2015 masih terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, itu disebabkan karena :

1. Anggaran hibah untuk masyarakat tidak dapat dilaksanakan. Itu disebabkan oleh calon penerima hibah belum berbadan hukum.
2. Adanya 6 (enam) paket kegiatan yang gagal lelang. Itu disebabkan oleh penyedia yang memasukan penawaran tidak lulus kualifikasi administrasi dan teknis.
3. Perhitungan waktu yang tidak cukup.

Selain itu pada tahun 2015 juga masih terdapat 2 kegiatan yang putus kontrak yaitu Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Bobotsari dan Pengadaan Kendaraan Road Maintenance Truk. Dengan masih adanya kegiatan yang putus kontrak pada tahun 2015 tentunya merugikan bagi pemerintah dan masyarakat,

namun karena dalam pelaksanaannya kegiatan harus berpedoman pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku maka tetap dilakukan putus kontrak.

d. Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Realisasi capaian indikator kinerja Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian tahun 2015 WDP atau 75% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2015 yaitu sebesar WDP. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah WTP.

Tabel 3.10 Terwujudnya Hasil Audit Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	75

Realisasi indikator Terwujudnya hasil audit dari BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah WDP. Untuk target pada akhir RPJMD adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini disebabkan BPK RI masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyajikan Laporan Keuangan Daerah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Misi Kedua : **Sasaran Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, Tertib, dan Demokratis Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Sasaran Kesatu : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang.

a. Menurunnya angka kriminalitas.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya angka kriminalitas tahun 2015 sebesar 0,1/10.000 kasus atau 200% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 0,3 kasus/10.000 penduduk.

Tabel 3.11 Menurunnya Angka Kriminalitas Tahun 2015 (per 10.000 penduduk)

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya angka kriminalitas	3 kasus	13%	0,8 kasus	0,3 kasus	0,3 kasus	0,1 kasus	200

Realisasi indikator Menurunnya angka kriminalitas pada tahun 2011 sebesar 3/10.000 penduduk. Pada tahun 2012 realisasinya 13% dan pada tahun 2013 sebanyak 0,8/10.000 penduduk. Realisasi tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2013. Target akhir yang ditetapkan pada RPJMD adalah menurun setiap tahunnya.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya angka pengangguran terutama bagi kaum pria, sebab lain faktor ekonomi, serta disamping itu masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam ikut membantu aparat baik TNI/POLRI atau Satpol PP untuk memberikan informasi, disamping itu juga faktor kesenjangan sosial dimana untuk peluang kerja bagi kaum pria sangat. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut ialah antara lain diadakannya patroli patroli gabungan baik dari unsur TNI/POLRI dan Satpol PP serta dukungan melalui kerjasama atau MoU sehingga angka kriminalitas tiap tahun dapat di minimalisir serta adanya dukungan dari Pemerintah memberikan dukungan guna mengurangi angka pengangguran dengan cara membuka lowongan kerja bagi

kaum pria atau memberikan ketrampilan sehingga bagi para pemuda- pemudi sehingga menjadi tenaga trampil dan siap di berdayagunakan dalam hal ini DINSOSNAKERTRANS selaku pengampu ketenagakerjaan memiliki kegiatan membuka Bursa kerja

Terciptanya rasa aman dan terwujudnya stabilitas keamanan, ketentraman, melalui penertiban hukum terhadap ketentuan pidana perda, serta mendukung berbagai aktifitas masyarakat, dan mewujudkan rasa aman guna menekan angka kriminalitas, melalui Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

b. Menurunnya angka pelanggaran perda.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya angka kriminalitas tahun 2015 sebesar 324 kasus atau 37,72% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 919 kasus. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 menurun setiap tahunnya.

Tabel 3.12 Menurunnya Angka Pelanggaran Perda Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya angka pelanggaran perda	Menurun	735 kasus	919 kasus	1.440 kasus	1.000 kasus	324 kasus	306,64

Realisasi Menurunnya angka pelanggaran Perda pada tahun 2011 adalah menurun. Realisasi pada tahun 2012 meningkat secara drastis sebanyak 735 kasus. Pada tahun 2013 realisasinya meningkat menjadi 919 kasus. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat secara drastis menjadi 1.440 kasus. Pada tahun 2015 capaiannya menjadi 324 kasus.

Kendala dalam melaksanakan operasi miras, para pedagang miras menyimpan barang dagangannya di rumah sehingga dalam pelaksanaan operasi dilapangan tidak mendapatkan hasil yang dicapai, serta masih kurangnya masyarakat mau memberikan informasi keberadaan para penjual miras, disamping itu fenomena dimasyarakat banyaknya anak muda menggunakan obat batuk cair

digunakan untuk oplosan minuman. Solusi mengatasi kendala adalah perlu adanya revisi perda miras serta adanya sanksi yang jelas baik bagi penjual maupun pembeli sehingga membuat efek jera, serta perlunya pengawasan bagi para penjual obat batuk cair diwarung atau toko apabila ada pembeli yang melebihi dari kewajaran agar perlu dipertimbangkan atau ditanya peruntukannya.

c. Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat tahun 2015 sebesar 4 kasus atau 100% dari target yang ditentukan.

Tabel 3.13 Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat	2 kasus	Menurun 14%	34 kasus	7 kasus	345 kasus	4 kasus	100

Realisasi indikator Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat pada tahun 2011 adalah 2 kasus. Pada tahun 2012 menurun 14% dan pada tahun 2013 terjadi 34 kasus. Pada tahun 2014 menjadi 7 kasus yang terjadi di masyarakat. Pada tahun 2015 realisasi adalah 4 kasus.

Kasus-kasus tindak kekerasan dan konflik di masyarakat terjadi karena beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor kesadaran hukum dari masyarakat yang masih kurang, faktor masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat adalah:

- a. Mengoptimalkan fungsi intelijen yang ada pada masing – masing unsur baik dari TNI, Polri, Kejaksaan dan unsur lainnya yang di koordinasikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).

- b. Memberikan penyuluhan – penyuluhan masalah hukum melalui forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Etnis, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa dan kegiatan – kegiatan lainnya yang dapat menyadarkan masyarakat tentang arti kerukunan sehingga bisa menekan angka tindak kekerasan dan konflik yang ada di masyarakat.

Sasaran Kedua : Meningkatnya kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM)

- a. Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat tahun 2015 sebanyak 169 terdiri dari Ormas : Ormas : 49 LSM : 50, OKP : 15, Yayasan : 29 Pondok Pesantren : 10 Panti Asuhan : 4, Ormas Aliran Kepercayaan : 12 atau 101,80% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2014 dari capaian tahun 2015 yaitu sebanyak 166 organisasi. Capaian tahun 2015 sudah mencapai target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak 169 organisasi.

Tabel 3.14 Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat	95 kelompok	139 kelompok	166 kelompok	151 kelompok	166 kelompok	169 kelompok	101,80

Realisasi indikator Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat pada tahun 2011 sebanyak 95 kelompok masyarakat. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 73 menjadi 139 kelompok. Realisasi tahun 2013 sebanyak 166 kelompok atau meningkat sebesar 27 kelompok. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan sebanyak 15 kelompok menjadi 151 kelompok. Pada tahun

2015 mencapai 169 kelompok. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah meningkat.

Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Ormas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana Ormas harus berbadan hukum atau mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga adalah SKPD yang bertugas untuk mengatur, membina Organisasi Masyarakat yang ada di kabupaten dan sekaligus mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas berbadan hukum dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013.

b. Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat tahun 2015 sebanyak 10 kasus atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebanyak 7 kasus. Target akhir yang ditetapkan adalah menurun setiap tahunnya.

Tabel 3.15 Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat	2 kasus	31 kasus	27 kasus	7 kasus	10 kasus	10 kasus	100

Realisasi Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat pada tahun 2011 adalah 2 kasus. Pada tahun 2012 terjadi 31 kasus. Realisasi tahun 2013 menurun 4 kasus menjadi 27 kasus. Sedangkan realisasi pada tahun 2014 terjadi penurunan secara signifikan menjadi 7 kasus. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah menurun.

Data tersebut diperoleh dari Bagian Hukum dan HAM Setda dengan Tim Harapan. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Angka tersebut tetap belum dapat menggambarkan kasus kekerasan yang sesungguhnya karena tidak semua korban melaporkan kepada pelayanan terpadu

c. Menurunnya kasus trafficking.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kasus trafficking tahun 2014 adalah 1 kasus atau 150% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar tidak ada kasus. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah tidak ada kasus trafficking di Purbalingga.

Tabel 3.16 Menurunnya kasus trafficking Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya kasus trafficking	0	Tidak ada kasus	2 kasus	1 kasus	0	0	100

Realisasi Menurunnya kasus trafficking pada tahun 2011 adalah tidak ada kasus. Pada tahun 2012 tidak ada kasus. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan kasus menjadi 2 kasus. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 1 kasus. Tahun 2015 realisasinya adalah tidak ada kasus.

Semakin majunya teknologi informasi maka akan berpengaruh pada tingkat pergaulan pada seseorang. Terutama semakin mudahnya mengakses internet khususnya media sosial. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kasus trafficking yang terjadi di Purbalingga adalah melakukan pendampingan untuk memulihkan trauma yang dialami oleh korban, penjemputan dari kasus itu terjadi dan pemulangnya. Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Harapan melakukan sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk mengatasi hal tersebut.

Sasaran Ketiga : Tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika sosial-ekonomi guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, serta meningkatkan akselerasi pembangunan

- a. Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kadaluarsa/ tidak sesuai dengan peraturan/ perundangan yang lebih tinggi.

Realisasi capaian indikator kinerja Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kadaluarsa/tidak sesuai dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi adalah tidak ada Perda yang kadaluarsa atau 100% dari target yang ditentukan.

Tabel 3.17 Berkurangnya Jumlah Peraturan Daerah yang kadaluarsa/Tidak Sesuai dengan Peraturan/Perundangan yang Lebih Tinggi Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kadaluarsa/ tidak sesuai dengan peraturan/peru ndangan yang lebih tinggi	Tidak ada	Tidak ada	3 Perda	0	0	0	100

Pada tahun 2011 dan 2014 realisasi indikator Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kadaluarsa/ tidak sesuai dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi adalah tidak ada. Realisasi pada tahun 2013 ada 3 Perda. Pada tahun 2014 realisasinya adalah tidak ada. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah tidak ada.

Pada tahun 2015 sudah tidak ada Perda yang kadaluarsa. Itu dikarenakan adanya kegiatan pengawasan Perda. Kegiatan tersebut untuk mengawasi Perda

yang sudah kadaluarsa atau ada peraturan terbaru yang lebih tinggi dan harus dibuatkan Perdanya.

b. Tidak adanya produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat

Realisasi capaian indikator kinerja Tidak adanya produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat tahun 2015 tidak ada yang dibatalkan atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian Tahun 2015 tidak ada yang dibatalkan. Itu disebabkan karena tidak adanya produk hukum yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tabel 3.18 Tidak Adanya Produk Hukum yang Dibatalkan Pemerintah Pusat Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Tidak adanya produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	100

Realisasi indikator produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu tidak ada. Target akhir RPJMD sudah terealisasi sejak tahun pertama RPJMD yaitu tahun 2011.

Sasaran Keempat : Terwujudnya kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatnya partisipasi politik rakyat, serta meningkatnya peran dan fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

a. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah tahun 2015 adalah Pilbup 60,35% atau 80,44% dari target yang ditentukan. Capaian tahun 2015 menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu Pilbup sebesar 75%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah rata-rata partisipasi masyarakat pada setiap pesta demokrasi adalah 80% dari total pemilih yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah	-	-	Pilgub 59,02%	Pileg dan Pilpres 70%	Pilkada 75%	Pilbup 60,35%	80,44

Pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada pemilihan legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu realisasinya adalah 0 (nol). Pada tahun 2013 di Jawa Tengah mengadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, realisasinya adalah 59,02% masyarakat di Purbalingga menggunakan hak pilihnya. Pada tahun 2014 masyarakat Indonesia mengadakan pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat dan memilih Presiden dan Wakil Presiden dan

70% masyarakat di Purbalingga menggunakan hak pilihnya. Pada tanggal 9 Desember 2015 Kabupaten Purbalingga mengadakan pesta demokrasi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sebesar 80,44%. Adapun target akhir RPJMD adalah 80% masyarakat di Purbalingga menggunakan hak pilihnya.

Beberapa upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga selaku Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula yang melibatkan kurang lebih 200 pemilih pemula dari perwakilan kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya melaksanakan pemantauan terhadap tahapan – tahapan penyelenggaraan Pemilu, memberikan informasi ataupun penyuluhan terkait pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kesempatan. Banyaknya masyarakat purbalingga yang merantau dan masih menjadi penduduk Pubalingga menyebabkan tingginya angka ketidakhadiran pemilih ke TPS.

b. Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD tahun 2015 yaitu 4 Raperda Prakarsa atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu tidak ada Raperda Prakarsa. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah adanya pengusulan Raperda dari DPRD.

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Meningkatnya Jumlah Peraturan Daerah yang Disusun Berdasarkan Prakarsa DPRD Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD	4 Rapperda	Tidak ada Raperda Prakasa	Tidak ada Raperda Prakasa	Tidak ada Raperda Prakasa	4 Rapperda	4 Rapperda	100

Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD pada tahun 2011 adalah 4 Raperda. Sedangkan capaian pada tahun 2012 sampai dengan 2014 yaitu tidak ada raperda prakarsa. Pada tahun 2015 realisasinya adalah sebanyak 4 Raperda.

Perda prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dengan masing masing Komisi pada DPRD Kabupaten Purbalingga mengusulkan 1(satu) Perda, yang terdiri dari Perda Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Perda Tentang Jalan, Perda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025 dan Perda Tentang Usaha Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga.

c. Penetapan APBD tepat waktu

Realisasi capaian indikator kinerja Penetapan APBD tepat waktu tahun 2015 sebesar tepat waktu atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar tepat waktu. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah tepat waktu.

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Penetapan APBD tepat waktu Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Penetapan APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100

Realisasi Capaian Kinerja Penetapan APBD tepat waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah tepat waktu. Realisasi ini sudah mencapai target 2015.

Misi Ketiga : Sasaran Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Semakin Berkualitas, Berakhlak Mulia, Beretika, serta Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme.

Sasaran Kesatu : Meningkatnya Kualitas Manusia Secara Umum

a. Indeks Pembangunan Manusia

Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 sebesar 65,53. Ini disebabkan karena metode perhitungan IPM dari BPS yang berubah. Dengan metode penghitungan yang baru tersebut, maka untuk capaian 2015 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun yang lalu. Target yang ditentukan pada tahun 2015 adalah masih menggunakan perhitungan yang lama.

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia dengan Metode Perhitungan yang Lama

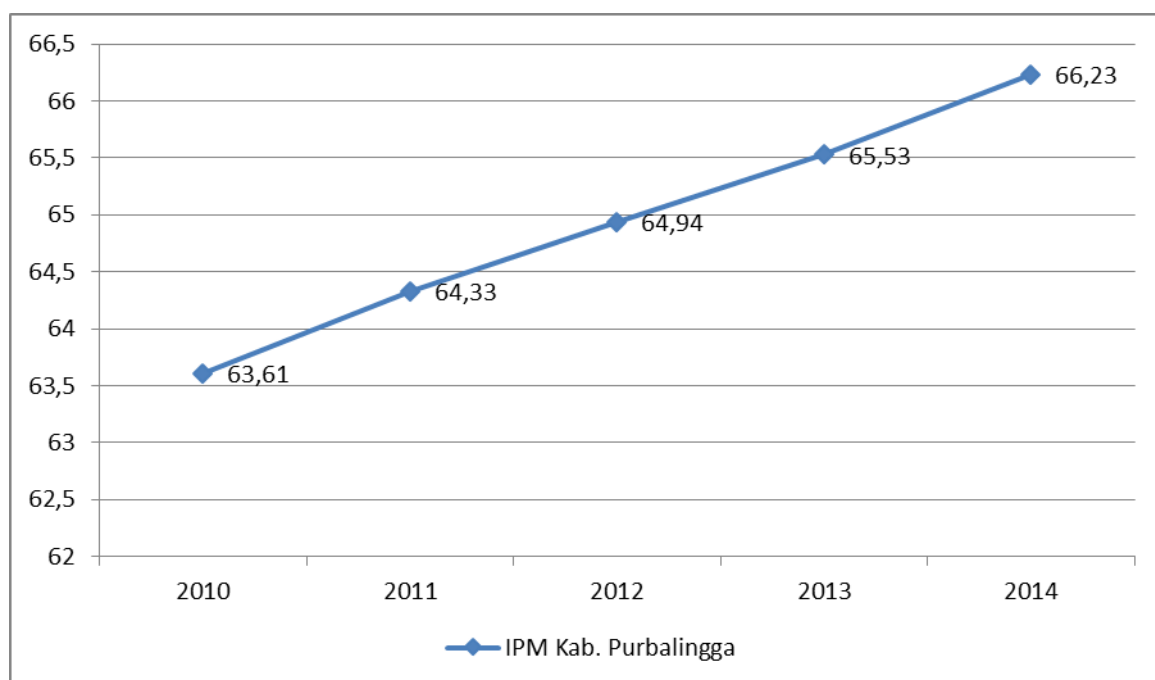
INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014
Indeks Pembangunan Manusia	72,07	72,80	72,49	73,49 (2013)

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia dengan Metode Penghitungan yang Baru

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2010	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Capaian %
Indeks Pembangunan Manusia	63,61	64,33	64,94	65,53	66,23	100

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2014. Pada tahun 2010, IPM Kabupaten Purbalingga mencapai 63,61 meningkat menjadi 64,33 pada tahun 2011. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2012 dan 2013 dimana masing-masing capaian IPM mencapai 64,94 dan 65,53. Perkembangan IPM Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini.

Gambar 3.1 Perkembangan IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak berjalan sendiri, tergantung pada mutu distribusi pendapatan dan tergantung pada prioritas belanja pemerintah daerah. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga diharapkan memberi dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk. Oleh karena itu maka kinerja pembangunan tersebut perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi, yang salah satunya dengan menggunakan set indikator pembangunan manusia yaitu dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, sebagai indikator target pembangunan pemerintah dan juga sebagai alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penghitungan IPM tahun 2014 sudah menggunakan metode baru dengan tetap mengukur 3 (tiga) aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (angka harapan hidup saat lahir), pengetahuan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah 25+) dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita disesuaikan: 96 komoditas PPP). Selain tahun 2014 dengan metode baru dapat dihitung nilai IPM 5 tahun kebelakang.

Tabel 3.24 Nilai IPM Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2010–2014

Kabupaten	Nilai IPM					Ranking IPM				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Cilacap	64,18	64,73	65,72	66,80	67,25	22	23	23	21	21
Banyumas	66,87	67,45	68,06	68,55	69,25	15	16	16	16	16
Purbalingga	63,61	64,33	64,94	65,53	66,23	25	25	25	26	26
Banjarnegara	60,70	61,58	62,29	62,84	63,15	33	33	33	33	33
Kebumen	63,08	64,05	64,47	64,86	65,67	27	28	29	29	29
Jawa Tengah	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	13	14	15	13	13

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah 2014

Nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2014 tercatat 66,23. Walaupun nilai ini masih dibawah propinsi Jawa Tengah namun bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPM Kabupaten Purbalingga berada diatas Kabupaten Banjarnegara, dan Kebumen tetapi masih dibawah Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Demikian juga kondisi tahun 2013, IPM Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat 26 masih dibawah Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Empat komponen penghitungan IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Angka harapan hidup Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan dari 72,56 pada tahun 2010 menjadi 72,63 pada tahun 2011, dan terus meningkat lagi hingga menjadi 72,80 pada tahun 2014. Ini memberikan gambaran bahwa ada peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Purbalingga. Begitu juga di bidang pendidikan yang diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Untuk harapan lama sekolah ada peningkatan dari 10,71 pada tahun 2010 menjadi 10,84 pada tahun 2011 dan terus naik pada tahun 2014 menjadi 11,51. Rata-rata lama sekolah untuk penduduk 25 tahun ke atas Kabupaten Purbalingga tahun 2010 adalah 6,22 tahun, naik menjadi 6,68 pada tahun 2013 dan naik lagi menjadi 6,84 pada tahun 2014. Sementara itu besarnya paritas daya beli penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2014 adalah 8.539 ribu rupiah. Perkembangan indikator komposit IPM Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 3.25 Komponen IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

Komponen IPM	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,56	72,63	72,69	72,76	72,80
Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,71	10,84	10,98	11,10	11,51
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,22	6,33	6,44	6,68	6,84
Pengeluaran per kapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah PPP)	7.930	8.228	8.450	8.535	8.539

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga 2014

b. Indeks Pembangunan Gender

Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2015 sebesar 90,12 atau 134,75% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 64,20%.

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Indeks Pembangunan Gender	62,48	62,89	64,88	64,20	66,88	90,12	134,75

Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 realisasinya adalah 62,48. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 menjadi 62,89. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 64,88. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan 0,68 menjadi 64,20. Capaian akhir yang dicapai pada RPJMD adalah 90,12.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui

kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar 61,64 pada tahun 2009 menjadi sebesar 63,94 pada tahun 2013. Peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kabupaten Purbalingga semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

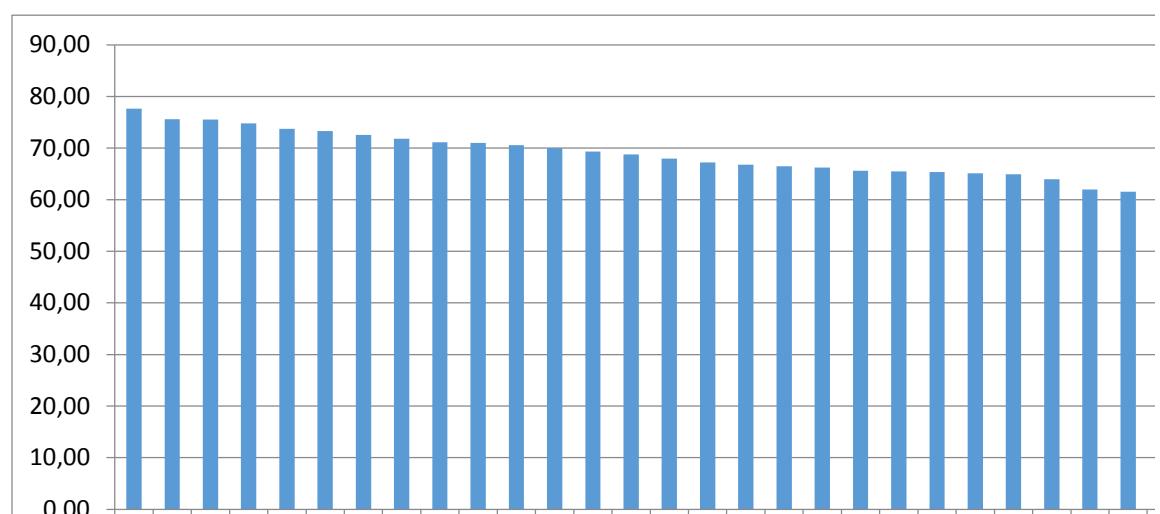
Tabel 3.27 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 – 2013

Tahun	Nilai IPG
2009	61,64
2010	62,48
2011	62,89
2012	63,43
2013	63,94

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014

IPG Kabupaten Purbalingga menempati peringkat ke-25 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, seperti terlihat pada grafik berikut.

Gambar 3.2 Perbandingan IPG Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014

Sasaran kedua : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga

a. Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera tahun 2015 adalah 71.948 KK atau 101,33% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 71.844 KK.

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera	74.645 KK	74.811 KK	74.161 KK	71.844 KK	71.000 KK	71.948 KK	101,33

Realisasi indikator kinerja Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2011 adalah 74.645 KK. Pada tahun 2012 bertambah menjadi 74.811 KK. Pada tahun 2013 menjadi 74.161 KK dan pada tahun 2014 menurun menjadi 71.844 KK. Pada tahun 2015 realisasinya adalah 71.948 KK.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain belum semua kelompok BKB terintegrasi dengan PAUD dan pelayanan KB melalui kegiatan sosial dengan diberi sembako. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain :

1. Mengadakan plesterisasi rumah keluarga pra sejahtera;
2. Meningkatkan keluarga pra sejahtera dengan UPPKS;
3. Meningkatkan kepesertaan KB pada keluarga pra sejahtera secara gratis;
4. Mengikutsertakan keluarga pra sejahtera dalam kegiatan BKB terintegrasi dengan posyandu dan PAUD.

b. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 adalah 0,34% atau 102,9% dari target yang ditentukan.

Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 0,32%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 menurun setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) dapat diukur dengan rumus :

$$LPP = \frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun Lalu} - \text{Jumlah Penduduk tahun ini}}{\text{Jumlah Penduduk Tahun Lalu}}$$

Tujuannya adalah menekan dan mengendalikan kelahiran melalui alat kontrasepsi dan menurunkan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan.

Kendala yang dihadapi dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk antara lain :

- 1) Akseptor lebih suka memilih alat kontrasepsi hormonal sehingga pencapaian MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) masih rendah.
- 2) Partisipasi laki-laki dalam ber KB masih rendah.
- 3) Masyarakat dan keluarga belum memahami Pendidikan Anak Usia Dini.
- 4) Produktifitas lansia masih dipandang sudah tidak produktif lagi.
- 5) Keluarga remaja masih belum memahami mengenai generasi muda berencana (GENRE).
- 6) Akses modal dan pemasaran dikelompok UPPKS masih rendah.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk adalah :

- 1) Meningkatkan kepesertaan KB;
- 2) Meningkatkan keaktifan peserta KB lama;
- 3) Meningkatkan advokasi dan informasi melalui media massa untuk kelompok perorangan dalam rangka melembagaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS);
- 4) Melaksanakan program pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, BKL;
- 5) Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kegiatan UPPKS.

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	0,56 %	0,8%	0,67%	0,32%	0,35%	0,34%	102,9

Realisasi indikator kinerja Menurunnya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2011 adalah 0,56% dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 0,8%. Pada tahun 2013 turun menjadi 0,67% sedangkan pada tahun 2014 turun menjadi 0,32%. Sedangkan capaian tahun 2015 sebesar 0,34%.

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 sebesar 931.129 jiwa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar 927.978 jiwa.

Tabel 3.30 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga

Kecamatan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Kemangkon	53.077	54.134	58,094	29.205	60.439
Bukateja	66.431	67.784	70,779	72.076	74.388
Kejobong	42.831	43.801	47,588	47.743	48.937
Pengadegan	35.698	36.464	36,684	37,448	35.412
Kaligondang	56.256	57.418	58,341	60.218	62.210
Purbalingga	56.384	57.467	57,913	56.691	58.002
Kalimanah	50.611	51.899	54,007	52,460	54.297
Padamara	39.994	41.245	43.060	42,449	40.061
Kutasari	55.679	56.905	56,660	58,346	59.928
Bojongsari	56.166	57.528	56.102	56,209	52.766
Mrebet	66.327	67.799	73.302	71,683	73.551
Bobotsari	47.279	48.282	51.016	51,109	52.194
Karangreja	39.854	40.692	43.870	42,892	43.269
Karangjambu	23.721	24.318	24.706	24,827	22.035
Karanganyar	34.503	35.179	37.428	38,148	38.024
Kertanegara	30.380	30.952	33.556	34,799	33.275
Karangmoncol	50.339	51.075	55.551	56,619	56.252
Rembang	57.861	58.709	68.360	66,855	66.092
Jumlah	863.391	881.831	927.017	927,978	931129

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

- c. Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera tahun 2015 adalah 87.911 atau 100,78% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 86.790.

Tabel 3.31 Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera	146.820 KK	146.800 KK	149.800 KK	86.790 KK	87.224 KK	87.911 KK	100,78

Realisasi indikator Kinerja Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera pada tahun 2011 sebanyak 146.820. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 146.800. Pada tahun 2013 menjadi 149.800. sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 86.790. Pada tahun 2015 realisasinya adalah 87.911.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera antara lain :

- 1) Masih belum diterimanya oleh kelompok masyarakat atau golongan tertentu;
- 2) Keikutsertaan masyarakat dalam program ketahanan keluarga masih rendah;
- 3) Informasi pendidikan reproduksi sehat untuk anak dan remaja dipandang masih tabu.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera antara lain :

- 1) Peningkatan kepesertaan KB bagi pasangan usia subur (PUS) melalui MUVAR (Muda Usia Varitas Rendah);
- 2) Mengikutsertakan GENRE bagi remaja dalam rangka menaikkan usia kawin pertama;
- 3) Mengikutsertakan keluarga dalam kegiatan BKB, BKR dan BKL;
- 4) Meningkatkan KIE dan advokasi melalui media massa dalam rangka melembagakan NKKBS.

Sasaran Kedua : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

a. Meningkatnya Usia Harapan Hidup.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya usia harapan hidup tahun 2015 sebesar 72,8 atau 102,41 % dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 71,08. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 70,60.

Tabel 3.32 Capaian Kinerja Meningkatnya Usia Harapan Hidup Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya usia harapan hidup	70,19 th	70,44 th	70,30 th	71,08 th	71,08 th	72,8 th	102,41

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 70,19 th. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 70,44 th. Akan tetapi pada tahun 2013 menurun menjadi 70,30 th. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 71,08. Pada tahun 2014 sudah mencapai target akhir RPJMD. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 70,6 th.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup individu di wilayah kabupaten Purbalingga menunjukkan trend kenaikan dari 71,08 menjadi 72,8 pada tahun 2015 dibandingkan dengan Usia harapan hidup Provinsi Jawa Tengah 72 tahun, maka Kabupaten Purbalingga hampir sama dengan provinsi dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka UHH Nasional (65 thn). Peningkatan usia harapan hidup ini dipengaruhi oleh faktor kesehatan yang menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya.

b. Menurunnya Angka Kematian Bayi.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya angka kematian bayi tahun 2015 sebesar 10 kasus/1.000 KH atau 90% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 10,9 kasus/1.000 KH. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 9/1.000 KH.

Tabel 3.33 Capaian Kinerja Menurunnya Angka Kematian Bayi Tahun 2015 (per 1.000 KH)

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya angka kematian bayi	10,8 kasus	11 kasus	11,3 kasus	10,9 kasus	9 kasus	10 kasus	90

Realisasi indikator Kinerja Menurunnya angka kematian bayi pada tahun 2011 adalah 10,8/1.000 KH. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 menjadi 11/1.000 KH. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 11,3/1.000 KH. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 10,9/1.000 KH. Realisasi pada tahun 2015 adalah 10/1.000 KH.

Angka kematian bayi merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, semakin rendah angka kematian bayi maka derajat kesehatan masyarakat semakin tinggi. Angka kematian bayi menunjukkan trend menurun dari 162 kasus (10,9/1.000 kelahiran hidup) menjadi 149 kasus (10/1.000 kelahiran hidup). Jika dibandingkan dengan target MDGs 23/1.000 kelahiran hidup, maka sudah mencapai target. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaiannya adalah faktor akseptabilitas dan tenaga medis terampil. Oleh karena itu upaya yang dilakukan antara lain adanya penyediaan fasilitas sarana kesehatan yang memadai, peningkatan ketrampilan tenaga medis serta peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

c. Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya angka kematian ibu melahirkan tahun 2015 sebesar 135,7/100.000 KH atau 66,66% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 94/100.000 KH.

Tabel 3.33 Capaian Kinerja Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2015 (per 100.000 KH)

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan	99,8	136	171	94	90	135,7	66,66

Realisasi indikator Kinerja Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan, tetapi realisasi tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 adalah 110/100.000 KH. Realisasi tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu 136/100.000 KH. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 171/100.000 KH. Pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 94/100.000 KH. Pada tahun 2015 angka kematian ibu di Kabupaten Purbalingga meningkat menjadi 135,7/100.000 KH.

Angka kematian ibu melahirkan merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, semakin rendah kematian ibu melahirkan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka kematian ibu melahirkan menunjukkan trend menurun dari 26 kasus (171/100.000 kelahiran hidup) pada tahun 2014 menjadi 14 kasus (94,47/100.000 kelahiran hidup), jika dibandingkan dengan target MDGs (102 per 100.000 kelahiran hidup) di tahun 2015, maka sudah mencapai target. Realisasi pada tahun 2015 terjadi 20 kasus (135,7/100.000 KH). Masih tingginya kematian ibu melahirkan dikarenakan berbagai hal. Sebagian besar kematian ibu melahirkan disebabkan karena pendarahan *Post Partum*, komplikasi penyakit degenerative dan kehamilan beresiko tinggi. Dinas Kesehatan sudah melakukan beberapa upaya terhadap kasus tersebut diantaranya adalah Refleksi Diskusi Kasus, Penerapan SOP

kegawat daruratan obstetric dan monitoring pelayanan ANC serta melakukan konsultasi dengan dokter obsgyn dan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan.

d. Menurunnya Presentase Gizi Kurang.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya presentase gizi kurang tahun 2015 sebesar 3% atau 138,98% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 2,16%.

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Menurunnya Presentase Gizi Kurang Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya presentase gizi kurang	1,12%	1,12%	3,38%	2,16%	2,16%	3%	138,98

Realisasi indikator Kinerja Menurunnya presentase gizi kurang pada tahun 2011 dan 2012 adalah 1,12%. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan secara drastis menjadi 3,38% dan tahun 2014 menurun menjadi 2,16%. Pada tahun 2015 realisasinya adalah meningkat 3%

Hal ini disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat di Posyandu dan faktor-faktor lain termasuk perilaku dalam deteksi dini tumbuh kembang bayi dan balita. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga adalah dengan program pencegahan dan penanggulangan masalah KEP, AGB, KVA dan kekurangan zat gizi mikro serta kegiatan posyandu yang dilaksanakan setiap bulan pada masing-masing desa/ kelurahan oleh kader dan bidan desa. Pemberian penyuluhan dan makanan tambahan pada kegiatan posyandu diharapkan akan menurunkan jumlah anak yang memiliki gizi kurang di Kabupaten Purbalingga.

e. Menurunnya Presentase Gizi Buruk.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya presentase gizi buruk tahun 2015 sebesar 0,11% atau 45,45% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 0,12%.

Tabel 3.35 Capaian Kinerja Menurunnya Presentase Gizi Buruk Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya presentase gizi buruk	0,15%	0,15%	0,11%	0,12%	0,05%	0,11%	45,45

Realisasi indikator Kinerja Menurunnya presentase gizi buruk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 dan 2012 adalah 0,15%. Pada tahun 2013 menurun menjadi 0,11%. Sedangkan pada tahun 2014 naik menjadi 0,12%.

Persentasi kasus gizi buruk merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, semakin rendah kasus gizi buruk semakin tinggi derajat kesehatannya. Persentase gizi buruk mencapai 66 kasus (0,12%), jika dibandingkan dengan target MDGs <3% di tahun 2015 maka sudah mencapai target. Upaya yang dilakukan melalui Progran Pemberian Makanan Tambahan serta pemeriksaan yang secara rutin dan ditangani oleh tenaga medis.

f. Meningkatnya Pemberian Asi Eksklusif.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya pemberian asi eksklusif tahun 2015 sebesar 62,92% atau 80,67% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 78%.

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Meningkatnya Pemberian Asi Eksklusif Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya pemberian asi eksklusif	53,9%	53,90%	58,70%	78%	78%	62,92%	80,67

Realisasi indikator Kinerja Meningkatnya pemberian asi eksklusif pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar 53,90%. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 58,70% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 78%. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah meningkat.

Semakin banyaknya perusahaan di Kabupaten Purbalingga yang para pekerjanya adalah kebanyakan perempuan akan mempengaruhi pemberian asi eksklusif untuk para anak mereka. Mereka akan memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak serta mengesampingkan akan pentingnya pemberian asi dan menggantinya dengan susu formula. Untuk mengatasi hal tersebut, yang sudah dilakukan adalah akselerasi pemanfaatan ASI dengan peningkatan kesadaran melalui pembinaan kaderzi, gerakan sadar gizi dan revitalisasi posyandu.

g. Meningkatnya Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2015 sebesar 99,99% atau 99,99 dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 98,82%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.37 Capaian Kinerja Meningkatnya Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Presentase %
Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	95,2%	95,20%	98,96%	98,82%	100%	99,99%	99,9

Realisasi indikator kinerja meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2011 dan tahun 2012 adalah 95,20%. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 98,96%. Akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 menjadi 98,82%.

Pertolongan persalinan menunjukkan tren positif. Hal ini disebabkan karena pemerintah berkomitmen untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan ditempatkannya bidan disetiap desa. Disamping itu, tingkat

kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan bayi mulai meningkat. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, semakin tinggi persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan ditempat pelayanan kesehatan maka akan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Capaian petolongan persalinan tenaga kesehatan sudah mencapai 99,99%, jika dibandingkan dengan Permenkes Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM di bidang kesehatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 95% di tahun 2015 maka Kabupaten Purbalingga sudah mencapai target.

Sasaran Ketiga : Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

a. Meningkatnya Angka Melek Huruf.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya Angka melek huruf tahun 2015 sebesar 96,28% atau 102,43% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu 93,78%.

Tabel 3.38 Capaian Kinerja Meningkatnya Angka melek huruf Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya Angka melek huruf	93,48%	N/A	92,41%	93,78%	94%	96,28%	102,43

Realisasi kinerja meningkatnya angka melek huruf pada tahun 2011 sebesar 93,48% dan pada tahun 2012 ini kami tidak bisa terukur. Pada tahun 2013 sebesar 92,41% dan pada tahun 2014 sebesar 93,78%.

Ada program khusus dalam rangka pelestarian angka melek huruf yaitu pemberantasan buta huruf yang dibiayai oleh APBN. Yang harus dirubah adalah usia anak sekolah (7 s.d 18 tahun), upaya yang dilakukan adalah melaksanakan kejar paket B dan C untuk usia 15 s.d 18 tahun dan membuka SMP Terbuka.

b. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya rata-rata lama sekolah tahun 2015 sebesar 6,76% atau 92,98% dari target yang ditentukan. Realisasi tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 7,23 tahun. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah sekolah 9 tahun.

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya rata-rata lama sekolah	7,18 tahun	N/A	7.50 tahun	7.23 tahun	7,27 tahun	6.76 tahun	92,98

Realisasi indikator kinerja meningkatnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2011 adalah 7,18 tahun. Realisasi pada tahun 2012 tidak bisa diukur. Pada tahun 2013 sebesar 7,50 tahun dan tahun 2014 menurun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 7,23 tahun. Pada realisasi akhir RPJMD pada tahun 2015 sebesar 6,76 tahun.

Dengan berkembangnya perusahaan di Purbalingga berdampak pada usia sekolah yang bekerja pada perusahaan tersebut dan masih kurangnya tingkat kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak. Mereka masih beranggapan dengan sekolah tinggi pun nantinya akan masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada di Purbalingga. Faktor ekonomi dan gaya hidup berpengaruh sangat banyak. Dengan program BOS diharapkan anak usia sekolah akan melanjutkan minimal sampai ke jenjang SMP.

c. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah.

Tabel 3.40 Capaian Kinerja Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya angka partisipasi sekolah							
• APM SD/ MI/ PAKET A	91,15%	91,99%	87,29%	101%	95%	90,89%	95,67%
• APM SMP/ MTs/ PAKET B	63,98%	50,50%	70,32%	75,00%	76%	69,30%	91,18%
• APM SMA/ SMK/ MA/ PAKET C	36,50%	32%	41,18%	46,00%	43%	45,18%	105,07%

Program Pendidikan Dasar : APK, APM tidak mencapai 100% karena menurunnya jumlah siswa usia sekolah yang kebanyakan dari mereka yang usia 15 tahun bekerja di perusahaan rambut sehingga lulusannya juga berkurang.

Program Pendidikan Menengah, indikator program yang tidak mencapai 100% karena kurangnya anggaran untuk membangun RKB (Ruang Kelas Baru)

Program Pendidikan Non Formal, indakator program yang tidak mencapai 100% karena kurangnya warga belajar yang mendaftar Kejar Paket A, Kejar Paket B, kejar Paket C dan banyak warga belajar yang tidak mengikuti ujian.

Sasaran Keempat : Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak.

a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender.

Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2015 sebesar 90,12 atau 134,75% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 64,20%.

Tabel 3.41 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Indeks Pembangunan Gender	62,48	62,89	64,88	64,20	66,88	90,12	134,75

Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 realisasinya adalah 62,48. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 menjadi 62,89. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 64,88. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan 0,68 menjadi 64,20. Capaian akhir yang dicapai pada RPJMD adalah 90,12.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar 61,64 pada tahun 2009 menjadi sebesar 63,94 pada tahun 2013. Peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kabupaten Purbalingga semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

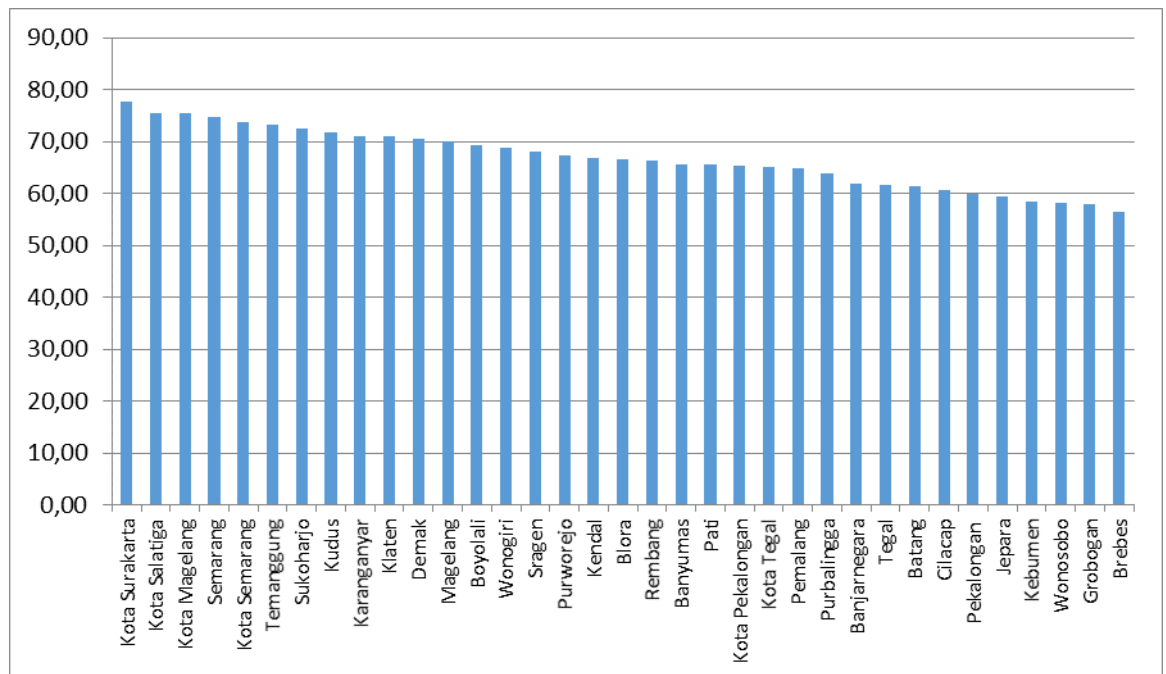
Tabel 3.42 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 – 2013

Tahun	Nilai IPG
2009	61,64
2010	62,48
2011	62,89
2012	63,43
2013	63,94

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014

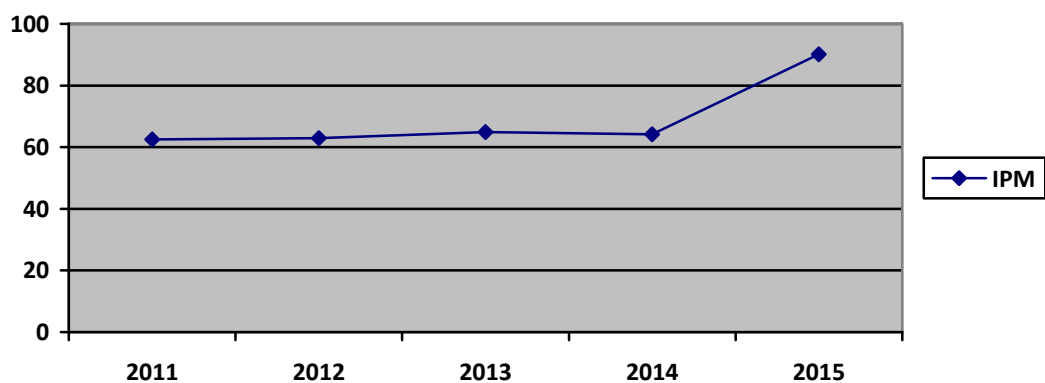
IPG Kabupaten Purbalingga menempati peringkat ke-25 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, seperti terlihat pada grafik berikut.

Gambar 3.3 Perbandingan IPG Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014

Gambar 3.4 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2015



b. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender.

Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2015 sebesar 71,03 atau 110,63 % dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 64,03%.

Tabel 3.43 Capaian Kinerja Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Indeks Pemberdayaan Gender	63,8	62,89	64,88	64,88	64	71,03	110,63

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan perkembangan yang positif, dari sebesar 63,98 pada tahun 2009 menjadi sebesar 68,66 pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin baik.

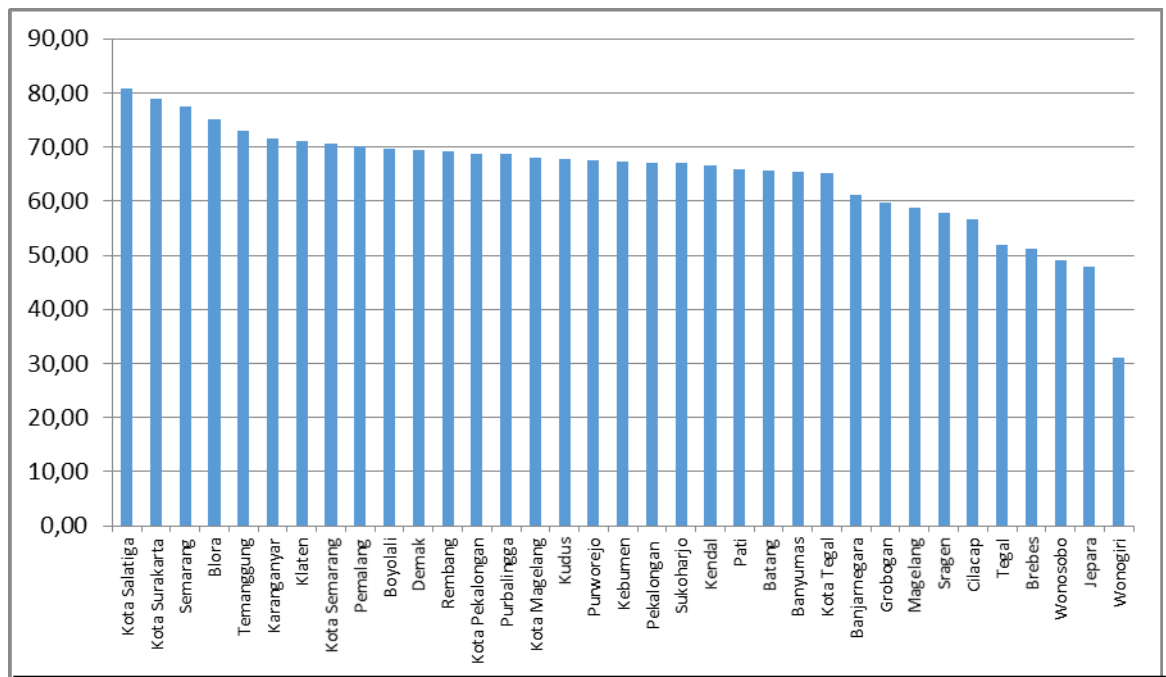
Tabel 3.44 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2013

Tahun	Nilai IPG
2009	63,98
2010	66,33
2011	67,47
2012	67,26
2013	68,66

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BPS

Capaian IDG Kabupaten Purbalingga menempati ranking ke-14 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.5 Perbandingan IDG Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014

c. Menurunnya Presentase Tenaga Kerja di Bawah Umur.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur tahun 2015 adalah tidak ada kasus kasus atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 3.45 Capaian Kinerja Menurunnya Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur	30 pekerja	4%	0	0	0	0	100

Realisasi Capaian Kinerja Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur pada tahun 2011 realisasinya adalah 30 pekerja. Pada tahun 2012 adalah 4%. Pada tahun 2013 capaiannya adalah tidak ada dan tahun 2014 capaiannya 3 kasus.

Lonjakan pekerja dibawah umur itu disebabkan banyaknya lowongan pekerjaan yang tidak mensyaratkan pendidikan yang tinggi. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga yang terbanyak adalah bergerak dibidang bulu mata dan rambut palsu. Pendidikan yang dibutuhkan pun sangat rendah. Masyarakat di pedesaan untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari memilih untuk bekerja. Oleh karena itu anak-anak perempuan khususnya daerah pedesaan paling tinggi hanya lulusan SMP. Mereka beranggapan bekerja itu lebih baik dari pada sekolah. Dengan bekerja mereka mendapatkan bayaran yang bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka.

d. Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak tahun 2015 adalah 4 kasus atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 10 kasus.

Tabel 3.46 Capaian Kinerja Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	11 kasus	11 kasus	8 kasus	10 kasus	4 kasus	4 kasus	100

Realisasi Capaian Kinerja Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011 dan tahun 2012 realisasinya adalah 11 kasus. Tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 8 kasus . tahun 2014 lebih tinggi dari pada tahun 2013 dan rebih rendah daripada tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar 10 kasus.

Kendala yang dihadapi adalah masih kentalnya budaya patriaki dan tindak kekerasan ibarat fenomena gunung es sehingga kasus yang ada tidak begitu banyak tetapi dibawah permukaannya terdapat kasus yang sangat besar tetapi tidak dilaporkan. Upaya yang dilakukan melaksanakan sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam menangani kekerasan.

e. Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak tahun 2015 adalah 13 kasus atau 30,76% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 8 kasus.

Tabel 3.47 Capaian Kinerja Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	17 kasus	20	18	8	4	13	30,76

Realisasi indikator kinerja menurunnya kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2011 sebanyak 17 kasus. Di tahun 2012, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu 20 kasus. Pada tahun 2013 realisasinya adalah 18 kasus. Sedangkan tahun 2014 turun menjadi 8 kasus.

Kendala yang dihadapi adalah belum sepenuhnya anak mengetahui hak-hak mereka, kurangnya pendidikan orang tua dalam mendidik anak sehingga menyebabkan pengasuhan yang salah, kemiskinan keluarga memaksa anak untuk bekerja dan kesibukan orang tua sehingga menjadi kurangnya kasih sayang kepada anak. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan terbentuknya forum anak sebagai implementasi terwujudnya kabupaten layak anak.

Sasaran Kelima : Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Terhadap Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Ekonomi Keluarga.

- a. Meningkatnya Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani tahun terdata di Kabupaten Purbalingga adalah sebanyak 25.969 orang dari 115.160 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Realisasi tahun 2014 adalah 1.094 orang. Realisasi akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 lebih tinggi dari target akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu 10%. Itu berarti sudah memenuhi target. Jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2014 sebanyak 65.470 orang sedangkan yang baru tertangani sebanyak 1.094 orang. Itu dikarenakan karena terbatasnya anggaran yang dikelola kepada Dinsosnakertrans

Tabel 3.48 Capaian Kinerja Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang Tertangani Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	2,6%	0,82%	2,24%	1,67% (1.094)	10%	22,55% (25.969)	225,5

Realisasi indikator kinerja meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani pada tahun 2011 sebesar 2,6%. Realisasi pada tahun 2012 mengalami penurunan secara drastis dibandingkan tahun 2011 sebesar 0,82%. Realisasi pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sebesar 2,24%. Sedangkan tahun 2014 menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 1.094 orang. Target yang ditetapkan RPJMD adalah 10%.

b. Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya jumlah rumah tangga miskin tahun 2015 sebesar 19,75% atau 96,20% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 20,58.

Tabel 3.49 Capaian Kinerja Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya jumlah rumah tangga miskin	23,73%	22,58%	21,19%	20,58%	19%	19,75%	96,20

Realisasi indikator Kinerja Menurunnya jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2011 sebesar 23,73%. Pada tahun 2012 ada peningkatan dibandingkan tahun 2011 sebesar 22,58%. Akan tetapi pada tahun 2013 kembali turun dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012 yaitu 21,19%. Pada tahun 2014 realisasinya adalah 20,58%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah menurun 19%.

Penduduk dikatakan miskin apabila pengeluarannya dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yaitu batas minimum makanan (setara 2100 kalori) ditambah dengan biaya pengeluaran untuk kebutuhan non makanan yang esensial seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi dan beberapa barang lainnya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 20,58 dari seluruh penduduk Purbalingga dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 275.022 per kapita/bulan, atau sejumlah 176.040 jiwa, menurun dari tahun 2013 sebesar 21,19 persen atau 181.100 jiwa. Salah satu faktor penyebab bertolak belakangnya presentase penduduk miskin dengan jumlah penduduk miskin dikarenakan naiknya garis kemiskinan Kabupaten Purbalingga, dimana pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 265.262 per kapita/bulan, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi Rp. 275.022 per kapita/bulan.

Tabel 3.50 Data Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	208.698	195.999	181.400	181.100	176.040
2	Persentase Penduduk Miskin (persen)	24,57	23,06	21,19	20,53	19,75

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar 13,58% dan Nasional sebesar 10,96%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga menempati posisi ke-4 tertinggi di Jawa Tengah.

Sasaran Keenam : Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter Tangguh, Kompetitif, dan Bermoral Tinggi, yang Dicterminkan dengan Meningkatnya Kualitas Intelektual, Berkembangnya Norma dan Etika Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Luhur Kepribadian Bangsa dan Nilai-Nilai Agama, Berkembangnya Budaya Baca Tulis, Meningkatnya Toleransi dan Kesetiakawanan Sosial, serta Berkembangnya Semangat Gotong Royong Sehingga dapat Terwujud Harmoni dan Dinamika dalam Kehidupan Sosial.

a. Menurunnya Angka Kasus Kenakalan Remaja.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya angka kasus kenakalan remaja tahun 2015 sebesar tidak ada kasus atau 300% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih bagus dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 6 kasus.

Tabel 3.51 Capaian Kinerja Menurunnya Angka Kasus Kenakalan Remaja Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya angka kasus kenakalan remaja	2 kasus	64 kasus	6 kasus	6 kasus	11 kasus	0 kasus	300

Realisasi indikator kinerja menurunnya angka kasus kenakalan remaja pada tahun 2011 sebanyak 2 kasus. Pada tahun 2012 kasus yang terjadi meningkat secara drastis yaitu sebanyak 64 kasus. Pada tahun 2013 kasus yang terjadi menurun menjadi 6 kasus. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014.

Kendala adalah tidak adanya sarana media bagi anak remaja seperti penataran, sosialisai, ataupun mendia guna mendukung kreativitas anak dan dukungan bentuk pelatihan. Adapun solusi untuk mengatasi kendala tersebut Dinbudparpora menyelenggarakan kegiatan napak tilas pelajar. Sedangkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ada kegiatan Kemah Kebangsaan dan kemah bakti kerukunan umat beragama, serta itu adanya program pendidikan bela negara bagi

para pemuda indonesia harus didukung oleh segenap elemen masyarakat guna menumbuhkan cinta tanah air dan wawasan kebangsaan.

b. Menurunnya Kasus Penggunaan Narkoba dan Miras.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kasus penggunaan Narkoba dan Miras tahun 2015 sebesar 44 kasus atau 50% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 19 kasus.

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Menurunnya Kasus Penggunaan Narkoba dan Miras Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	capaian %
Menurunnya kasus penggunaan Narkoba dan Miras	8 kasus	71 Kasus	19 kasus	19 kasus	20 Kasus	44 kasus	50

Realisasi indikator kinerja menurunnya kasus penggunaan narkoba dan miras pada tahun 2011 adalah sebesar 8 kasus. Pada tahun 2012 kasus yang terjadi meningkat secara drastis yaitu sebanyak 71 kasus. Pada tahun 2013 kasus yang terjadi menurun menjadi 19 kasus.

Adanya arus informasi yang semakin canggih, sehingga menyebabkan perubahan pola pikir remaja saat ini, yang cenderung melakukan pergaulan yang semakin bebas yang berpotensi meningkatkan penggunaan narkoba pada generasi muda.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan adanya Panti Rehabilitasi Korban Narkoba. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya adanya kecenderungan terjadi peningkatan jumlah korban pengguna narkoba yang dirawat di Panti Rehabilitasi YPI "Nurul Ichsan Al-Islami". Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan monitoring dan pendampingan korban pecandu narkoba yaitu, kadang dari pihak rumah sakit kurang terbuka dengan keberadaan pasien yang ditangani. Hal ini dimungkinkan karena situasi dan kondisi pasien dianggap

merupakan aib bagi keluarga dan keluarga pasien tidak ingin identitas diketahui oleh umum. Solusi kedepan akan lebih diberikan pemahaman kepada pihak keluarga tentang kegiatan ini.

c. Meningkatnya Jumlah Karangtaruna yang Aktif.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah karangtaruna yang aktif tahun 2014 adalah 145 organisasi atau 103,71% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 136 organisasi. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 masih lebih rendah dari target akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu 239 organisasi.

Tabel 3.53 Capaian Kinerja Meningkatnya Jumlah Karangtaruna yang Aktif Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya jumlah karangtaruna yang aktif	174 organisasi	130 Organisasi	136 organisasi	140 organisasi	141 Organisasi	145 organisasi	103,71

Realisasi indikator Kinerja Meningkatnya jumlah karangtaruna yang aktif pada tahun 2011 sebanyak 174 organisasi. Pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 130 organisasi. Untuk tahun 2013 realisasinya meningkat dibandingkan tahun 2012 menjadi 136 organisasi. Sedangkan pada tahun 2014 menjadi 140 organisasi. Realisasi akhir pada akhir masa RPJMD pada tahun 2015 adalah 141 organisasi.

Peningkatan jumlah karang taruna yang aktif pada tahun 2015 meningkat menjadi 141 organisasi. Pembinaan secara berkala yang dilakukan akan lebih menambah daya tarik tersendiri dalam mendorong masyarakat untuk membentuk suatu organisasi yang bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Ada beberapa keuntungan dengan adanya jumlah kelompok masyarakat antara lain memudahkan mendapatkan informasi untuk kemajuan baik itu untuk kelompok maupun untuk dirinya sendiri.

d. Meningkatnya Angka Kunjungan ke Perpustakaan.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya angka kunjungan ke perpustakaan tahun 2015 adalah 38.865 atau 97,16% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 27.534 orang.

Tabel 3.54 Capaian Kinerja Meningkatnya Angka Kunjungan ke Perpustakaan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya angka kunjungan ke perpustakaan	56.314 orang	52.750 orang	40.078 orang	27.534 orang	40.000 orang	38.865 orang	97,16

Realisasi indikator kinerja meningkatnya angka kunjungan ke perpustakaan pada tahun 2011 sebesar 56.314 orang. Pada tahun 2012 terjadi penurunan angka kunjungan perpustakaan menjadi 52.750 orang. Realisasi pada tahun 2013 turun menjadi 40.078 orang. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2014 menjadi 27.534 orang. Sedangkan tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 38.865 pengunjung.

Pada tahun 2015 pengunjung perpustakaan ditargetkan sebesar 40.000 orang. Namun hanya tercapai 38.865 orang. Pengunjung perpustakaan adalah pengunjung murni dari perpustakaan dan Perpustakaan Daerah telah menerapkan sistem otomatis perpustakaan, sehingga pengunjung perpustakaan sudah dapat dilihat pengunjung riilnya secara otomatis. Perpustakaan Daerah berupaya untuk meningkatkan angka kunjungan terutama bagi para pelajar yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan cara sosialisasi di sekolah-sekolah dan perpustakaan keliling ke desa-desa. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mendorong angka kunjungan ke perpustakaan dan untuk mengajak masyarakatnya untuk gemar membaca dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Purbalingga, perpustakaan keliling dan menambah fasilitas yang ada di perpustakaan. Penambahan koleksi

buku bacaan dari mulai buku cerita hingga buku-buku pengetahuan yang bersifat umum.

e. Menurunnya Konflik Horizontal dalam Kehidupan Masyarakat.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya konflik horizontal dalam kehidupan masyarakat tahun 2015 adalah 4 kasus atau 50% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun 2014 adalah 2 kasus.

Tabel 3.55 Capaian Kinerja Menurunnya Konflik Horizontal dalam Kehidupan Masyarakat Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya konflik horizontal dalam kehidupan masyarakat	0	0	0	2 kasus	2 kasus	4 kasus	50

Sasaran Ketujuh : Semakin Kokohnya Jatidiri dan Kepribadian Masyarakat Purbalingga

a. Meningkatnya Jumlah Kelompok/Paguyuban Seni Budaya Tradisional.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah kelompok/paguyuban seni budaya tradisional tahun 2015 adalah 307 atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 275. Capaian tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan pada akhir RPJMD yaitu 275 kelompok/ paguyuban.

Dinbudparpora secara periodik mendata dan membina kelompok seni yang ada di Purbalingga baik yang sudah berjalan dan menginventarisir kelompok seni yang baru.

Tabel 3.56 Capaian Kinerja Meningkatnya Jumlah Kelompok/Paguyuban Seni Budaya Tradisional Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya jumlah kelompok/paguyuban seni budaya tradisional	210 kelompok	98,93%	263 kelompok	275 kelompok	275 kelompok	307 kelompok	111,64

b. Meningkatnya Kegiatan Pentas Kesenian Tradisional.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya kegiatan pentas kesenian tradisional tahun 2015 adalah 33 kali atau 143,47% dari target yang ditentukan.

Tabel 3.57 Capaian Kinerja Meningkatnya Kegiatan Pentas Kesenian Tradisional Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya kegiatan pentas kesenian tradisional	25 kali	87,66%	15 kali	25 kali	23 kali	33 kali	143,47

Pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2011 menjadi 15 kali. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 23 kali, dan realisasi tahun 2015 capaiannya adalah 33 kali atau 143,47%.

Meningkatnya jumlah kegiatan pentas seni tradisional dikarenakan oleh adanya permintaan dari pihak lain untuk bantuan pentas seni. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinbudparpora dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Banyaknya pementasan seni menjadi salah satu penyemangat untuk masyarakat dalam mementaskan seni tradisional. Pengkaderan juga mempengaruhi dalam kegiatan seni tradisional. Generasi muda saat ini lebih cenderung pada kegiatan yang bersifat modern. Ada anggapan kalau seni tradisional itu adalah ketinggalan jaman.

Banyak faktor positif yang bisa diambil pada seni tradisional antara lain sikap dan perilaku.

Sasaran Kedelapan : Meningkatnya Semangat dan Wawasan Kebangsaan.

a. Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar Nasional.

Realisasi capaian indikator kinerja Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional tahun 2015 adalah 10 kegiatan atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 10 kegiatan.

Tabel 3.58 Capaian Kinerja Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	100%	17 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	100

Pada tahun 2012 realisasinya sebesar 17 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 10 kegiatan. Dan pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah 10 kegiatan.

Berlatar belakang sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa lain, Indonesia telah mengalami berbagai fase kedaulatan dalam jangka waktu yang panjang. Setiap fase tersebut dilalui dengan cucuran darah dan keringat semangat untuk terbebas dari belenggu penjajahan. Setiap fase itu pula menjadi tonggak sebuah peristiwa bersejarah yang harus diperingati. Sebagai upaya untuk mengingat kembali semangat dan penghargaan jasa para pahlawan, tonggak – tonggak peristiwa tersebut kemudian dideklarasikan sebagai hari besar nasional. Tiada lain bahwa peringatan hari besar nasional sebagai upaya memperoleh persatuan dan kesatuan bangsa agar senantiasa terus dijadikan sebagai tali pengikat tali pengikat keutuhan bangsa.

b. Meningkatnya Kegiatan Forum Lintas Etnis dan Agama.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya kegiatan forum lintas etnis dan agama tahun 2015 adalah 22 kegiatan yang terdiri dari 4 kali kegiatan etnis dan 18 kali kegiatan agama atau 183,33% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 12 kegiatan.

Tabel 3.59 Capaian Kinerja Meningkatnya Kegiatan Forum Lintas Etnis dan Agama Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya kegiatan forum lintas etnis dan agama	18 kali	10 kali	Etnis 4 kali Agama 8 kali	Etnis 4 kali Agama 8 kali	Etnis 4 kali Agama 8 kali	Etnis 4 kali Agama 18 kali	183,33

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 18 kali. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 menjadi 10 kali. Akan tetapi pada tahun 2013 ada peningkatan menjadi 12 kali. Realisasi tahun 2014 sebesar 12 kali kegiatan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khas, yaitu kebhinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia. Kebinekaan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. dalam rangka menyelenggarakan otonomi. daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi Keempat : **Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga yang Semakin Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pendayagunaan Seluruh Potensi Daerah**

Sasaran Kesatu : Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan yang Mampu Dipertahankan pada Tingkat Aman dan dalam Kualitas Gizi yang Memadai, serta Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan Sampai ke Tingkat Rumah Tangga

a. Stabilitasnya Angka Inflasi.

Laju inflasi di Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 9,08%. Angka inflasi ini menurun dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 9,57%.

Tabel 3.60 Capaian Kinerja Stabilitasnya Angka Inflasi Tahun 2015

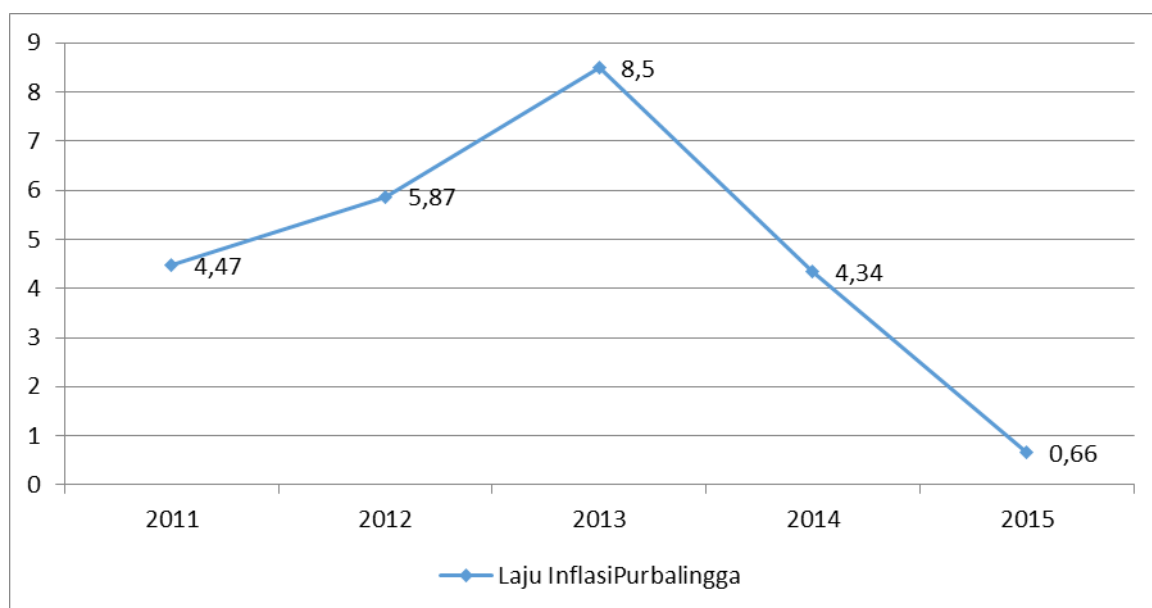
INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Stabilitasnya angka inflasi	4,47%	4,09%	9,57	9,08%	5-6%	5,14%	99,78

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 4,47%. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 menjadi 4,09%. Akan tetapi pada tahun 2013 meningkat drastis menjadi 9,57%. Sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 9,08%.

Inflasi menurut BPS adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen. Inflasi berpengaruh terhadap tingkat pembelian masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan tetap serta mempengaruhi besarnya produksi barang.

Apabila dilihat perkembangan inflasi tahun kalender setiap tahunnya, tren perubahan yang terjadi di Purbalingga, Purwokerto, Cilacap dan Jawa Tengah serta nasional menunjukkan pola yang hampir sama. Pada tahun 2014 terjadinya inflasi cukup tinggi terjadi pada bulan November dan Desember disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium dan solar yang berimbas pada kenaikan harga sejumlah komoditas terutama dikelompok transportasi dan bahan makanan.

Gambar 3.7 Laju Inflasi Tahun Kalender Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2015 (sampai dengan bulan Oktober)



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015

Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tingkat inflasi di Kabupaten Purbalingga tergolong cukup rendah. Kondisi semacam ini patut dipertahankan pada tahun-tahun mendatang agar inflasi tidak terlalu tinggi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menjadikan masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadi miskin. Beberapa langkah kebijakan dapat diambil, diantaranya dengan meningkatkan pemantauan pasokan barang dan tingkat harga di pasaran, melakukan operasi pasar pada waktu-waktu tertentu agar harga komoditas pangan utama tetap stabil. Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentunya perlu ditingkatkan agar tingkat inflasi dapat terjaga pada level yang wajar.

b. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya daya beli masyarakat tahun 2015 sebesar Rp. 520.635,- atau 75,36% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 641.630,-.

Tabel 3.61 Capaian Kinerja Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya daya beli masyarakat	Rp. 631.040,-	Rp. 636.000,-	Rp. 638.410,-	Rp. 641.630,-	Rp. 690.000,-	Rp. 520.633,-	75,36

Pada tahun 2011 realisasinya adalah Rp. 631.040,00. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi Rp. 636.000,00. Pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 638.410,00. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 641.630,00.

Tolak ukur kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari pola pengeluarannya. Pengeluaran rumah tangga per bulan di Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 masih terdapat 0,29 persen rumah tangga yang pengeluarannya antara Rp. 80.000,00 sampai Rp. 99.999,00, pada tahun 2011 tinggal 0,08 persen. Pada tahun 2012, pengeluaran rumah tangga rata-rata sudah diatas Rp. 100.000,00. Persentase rumah tangga yang pengeluarannya diatas Rp. 300.000,00 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 sebanyak 60,22 persen meningkat menjadi 62,08 persen di tahun 2012. Sementara itu pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp. 638.410,00.

c. Meningkatnya Uji Laboratorium pada Makanan yang Beredar.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya uji laboratorium pada makanan yang beredar tahun 2015 sebesar 160 sampel atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 152 sampel. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.62 Meningkatnya Uji Laboratorium pada Makanan yang Beredar Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya uji laboratorium pada makanan yang beredar	115 sampel	225 sampel	150 sampel	152 sampel	160 sampel	160 sampel	100

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 115 sampel. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 225 sampel. Akan tetapi pada tahun 2013 menurun menjadi 150 sampel. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 152 sampel.

Tingkat keamanan pangan dan kualitas gizi diukur dengan uji laboratorium pada makanan yang beredar dari target 160 terpenuhi 160 sampel makanan sehingga tercapai 100%, dari 160 sampel makanan yang diperiksa ada 7 jenis makanan yang ditemukan tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal ini telah dilakukan pembinaan dan penyuluhan kepada penyedia dan penjual makanan. Dengan demikian maka makanan yang beredar dipasaran diharapkan memenuhi syarat kesehatan.

d. Ketersediaan Pangan Utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tahun).

Realisasi capaian indikator kinerja Ketersediaan pangan utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tahun) tahun 2015 adalah 142.934 kg/kapita/tahun atau 141,15% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dengan capaian tahun 2014 yaitu 114.454 kg/kapita/tahun.

Tabel 3.63 Capaian Kinerja Ketersediaan Pangan Utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tahun) Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Ketersediaan pangan utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/ tahun)	144.748 kg/ kapita/ tahun	157.146 kg/ kapita/ tahun	169.420 kg/ kapita/ tahun	114.454 kg/ kapita/ tahun	125.213 kg/ kapita/ tahun	142.934 kg/ kapita/ tahun	141,15

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 144,748 kg/ kapita/ tahun. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 157,146 kg/ kapita/ tahun. Pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 169,420 kg/ kapita/ tahun. Sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 114,454 kg/ kapita/ tahun. Target tahun 2015 adalah 125,213 yang berarti diatas angka normatif.

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan produksi pangan berupa beras dibandingkan dengan jumlah penduduk tengah tahun. Konsumsi pangan normative beras adalah 92,87 kg/kapita/ tahun. Ketersediaan pangan harus melebihi angka konsumsi tersebut. Produksi gabah kering giling tahun 2015 adalah 211.163 ton. Gabah kering panen pada tahun 2015 adalah 249.692 ton dan produksi beras pada tahun 2015 adalah 133.032 ton. Kendala yang dihadapi adalah :

1. Luas lahan pertanian semakin berkurang akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (perumahan, industri, fasilitas umum dll).
2. Jaringan irigasi teknis banyak mengalami kerusakan sehingga irigasi mengalami kebocoran.
3. Terjadinya serangan hama tanaman.
4. Terjadinya kemarau panjang sehingga jadwal panen mundur.

Upaya yang dilakukan adalah :

1. Menetapkan lahan pangan lestari/ abadi yang tidak boleh dialih fungsi pada kawasan budidaya, sedangkan pada kawasan non budidaya adalah memperketat perijinan alih fungsi lahan.
2. Perbaikan jaringan irigasi teknis saluran sekunder, tersier dan non teknis.
3. Pemberantasan hama secara terpadu.
4. Mensukseskan program padi, jagung dan kedelai (pajale)

e. Meningkatnya Indeks Konsumsi Non Pangan.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya indeks konsumsi non pangan tahun 2015 adalah 45,25% atau 100,55% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu 42,37%.

Tabel 3.64 Meningkatnya Indeks Konsumsi Non Pangan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya indeks konsumsi non pangan	Meningkat 1,04%	82,7%	44,9%	42,37%	45,97%	45,25%	100,55

Pada tahun 2011 realisasinya adalah meningkat 1,04%. Pada tahun 2012 menjadi tahun 2011 menjadi 82,7%. Pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012 menjadi 44,9%. Sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 42,37%.

Peningkatan konsumsi non pangan bertujuan agar konsumsi pangan masyarakat jangan bersumber dari karbohidrat saja, tetapi juga bersumber dari sumber gizi lainnya. Kendala yang dihadapi antara lain konsumsi pangan masyarakat belum beragam dan seimbang, sebagian besar berkonsumsi masih bersumber dari karbohidrat terutama beras serta perubahan budaya pola konsumsi pangan memerlukan waktu yang lama dan berkelanjutan. Untuk mengupayakan hal tersebut dilakukan beberapa hal antara lain dengan melakukan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan mengenalkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan aman.

Kabupaten Purbalingga telah mencanangkan ***“Gerakan One Day No Rice”*** yang dilaksanakan setiap hari Rabu dengan mengkonsumsi makanan pengganti nasi/ karbohidrat yang bersumber dari bahan lokal seperti nasi jagung, tiwul, umbi-umbian dll serta snack yang berbahan baku non beras dan non terigu dalam setiap rapat maupun pertemuan baik formal maupun non formal agar kudapan dan buah-buahan yang disajikan dapat memanfaatkan pangan dan buah lokal.

Gerakan ***“Gerakan One Day No Rice”*** sebagai upaya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan mengurangi konsumsi beras dan terigu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian sehingga dapat mengurangi ketergantungan bahan konsumsi

impor dan meningkatkan surplus beras di Purbalingga serta mewujudkan kestabilan harga bahan baku kebutuhan pokok.

Sasaran Kedua : Semakin meningkat dan meratanya pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

a. Meningkatnya Pendapatan Per Kapita.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya pendapatan per kapita tahun 2015 sebesar Rp. 15.946.676,- atau 166% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 8.803.077,71,-. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.65 Capaian Kinerja Meningkatnya Pendapatan Per Kapita Tahun 2015
(dalam Rp.)

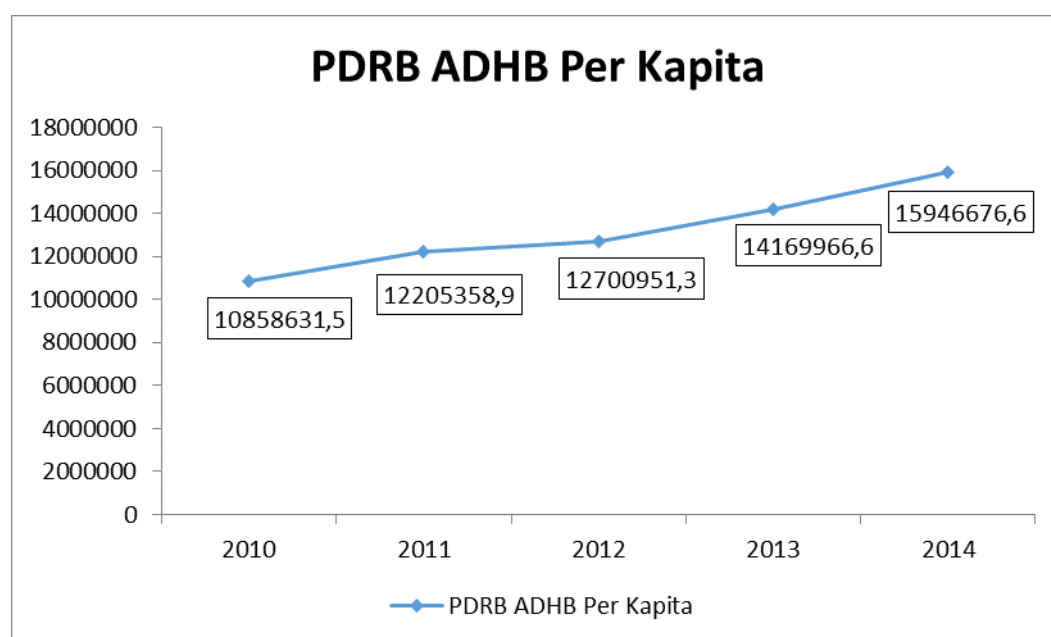
INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya pendapatan per kapita	6,7 juta/ th	5,8 Juta/ th	5.800.000/ th	8.803.077,71	9 Juta/ th	15.946.676	166

Pada tahun 2011 realisasinya adalah Rp. 6,7 juta/tahun. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 menjadi Rp. 5.800.000 per tahun. Pada tahun 2013 sama dengan tahun 2012 menjadi Rp. 5.800.000 per tahun. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 8.803.077,71 per tahun.

Produktivitas penduduk di sebuah wilayah secara matematis dapat dihitung menggunakan pendekatan PDRB per Kapita, yaitu sebuah model matematis yang membagi antara pendapatan regional terhadap jumlah masyarakat pada tengah tahun. PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2010–2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai Rp. 10.858.631,5 meningkat sebesar 12,40% menjadi Rp. 12.205.358,9 pada tahun 2011. Pada tahun 2012, kembali terjadi kenaikan capaian PDRB per kapita sebesar 4,06% menjadi Rp. 12.700.951,3.

Pada tahun 2013 kembali terjadi kenaikan sebesar 11,57% menjadi Rp. 14.169.966,6 dan pada tahun 2014 kembali terjadi kenaikan sebesar 12,54% menjadi Rp. 15.946.676,6. Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 3.7 Perkembangan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015

b. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar individu (indek Gini).

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kesenjangan pendapatan antar individu (indek Gini) tahun 2015 sebesar 0,30 atau 88,66% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu 0,33. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 0,248 (rendah).

Tabel 3.66 Capaian Kinerja Menurunnya kesenjangan pendapatan antar individu (indek Gini) Tahun 2015

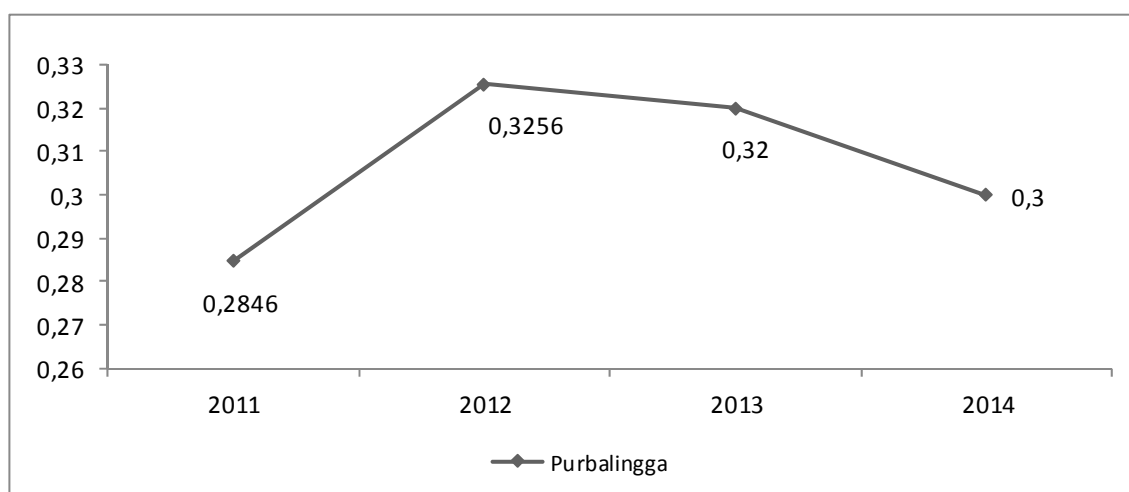
INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya kesenjangan pendapatan antar individu (indek Gini)	0,25	0,27	0,27	0,33 **	0,248	0,30	88,66

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 0,25. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 0,27. Pada tahun 2013 realisasinya sama dengan tahun 2012 menjadi 0,27. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,33**.

Indeks Gini merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menghitung ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya mencakup antara 0 hingga 1. Ketimpangan yang diukur menggunakan Indeks Gini biasanya bervariasi, tergantung kepada kebutuhan. Salah satu indikator yang dapat dihitung menggunakan indeks gini adalah ketimpangan terhadap pendapatan. Capaian Indeks Gini yang menunjukkan angka 0 menunjukkan ketiadaan ketimpangan pendapatan diantara satu penduduk dengan penduduk yang lain, sedangkan apabila menunjukkan angka 1 maka dipastikan terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi antara penduduk satu dengan yang lainnya. Ketimpangan yang terjadi berdasarkan perhitungan menggunakan Indeks Gini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah apabila capaian Indeks Gini berada dibawah 0,3; sedang apabila capaian Indeks Gini antara 0,3–0,4; dan tinggi apabila capaian Indeks Gini mencapai lebih dari 0,4.

Berdasarkan definisi diatas, data BPS Provinsi Jawa Tengah gini ratio untuk Kabupaten Purbalingga adalah 0,33** pada tahun 2014 yang artinya ketimpangan cukup rendah atau pemerataan cukup tinggi karena masih dibawah 0,35. Sementara itu gini ratio untuk Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 0,38 pada tahun 2014. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini.

Gambar 3.8 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014



Sumber: BPS Prov Jawa Tengah 2011-2014

c. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah (Indek Williamson).

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (indek Williamson) tahun 2015 sebesar 0,49 atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 0,49. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 0,3 (rendah).

Tabel 3.67 Capaian Kinerja Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah (Indek Williamson) Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (indek Williamson)	0,46	0,45	0,49	0,49	0,482	0,49	100

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 0,46. Pada tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun 2011 menjadi 0,45. Pada tahun 2013 capaiannya turun dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 0,49. Sedangkan pada tahun 2014 sama dengan tahun 2013 yaitu 0,49. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 0,3.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah diukur dengan Indeks Williamson. Semakin besar nilai Indeks Williamson atau mendekati nilai 1 (satu) maka semakin tinggi ketimpangan antar wilayah. Di Kabupaten Purbalingga, (Indeks Williamson) dari tahun 2008 sampai tahun 2014 masih dibawah 0,50 yang artinya masuk kategori kesenjangan sedang.

Tabel 3.68 Indeks Ketimpangan Regional

Tahun	Indeks Williamson	
	Purbalingga	Jawa Tengah
2007	0,5034	N/A
2008	0,49	0,7092
2009	0,4702	0,7035
2010	0,464	0,6972
2011	0,4995	0,6965
2012	0.48525*	N/A
2013	0.4873**	N/A
Sumber : BPS, Data Diolah		

d. Menurunnya Angka Pengangguran.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2015 adalah 4.691 orang atau 104,25% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 3.906 orang dari seluruh penduduk usia kerja yang mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya investor yang masuk ke Purbalingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk usia bekerja di Purbalingga. Pada tahun 2015 jumlah perusahaan asing yang ada di Purbalingga bertambah sebanyak 2 sehingga sekarang berjumlah 23 perusahaan. Itu berimbas pada pembukaan lowongan pekerjaan bagi pencari kerja. Di daerah-daerah pedesaan saat ini banyak terdapat *plasma* atau anak cabang perusahaan. Banyak angkatan kerja yang tertampung di perusahaan tersebut.

Tabel 3.69 Capaian Kinerja Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya angka pengangguran	4,54%	30,50%	3.123 orang	3.906 orang	4.500 orang	4.691 orang	104,25

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 4,54%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 30,50%. Pada tahun 2013 menjadi 3.123 orang. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.906 orang. Di tahun 2015 tenaga kerja yang dapat diterima perusahaan yang ada di Purbalingga sebanyak 4.691 orang. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 4,5%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Data Sakernas 2014 mencatat bahwa tingkat pengangguran Kabupaten Purbalingga sebesar 5,13 yang artinya terdapat sebanyak 5,13 persen penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Menurut Sakernas, pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil.

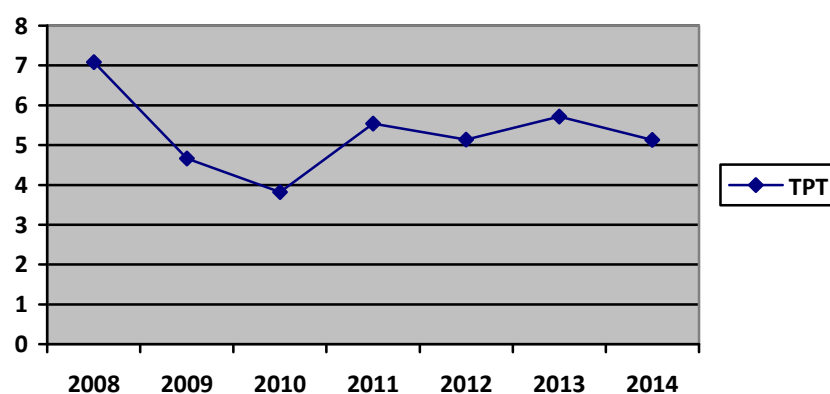
Tabel 3.70 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

Jenis Kelamin	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	6,10	6,82
Perempuan	5,22	2,80
Total	5,72	5,13

Sumber : Sakernas 2012-2013

Pada tahun 2014 persentase laki-laki yang menganggur lebih banyak dibanding perempuan demikian juga pada tahun 2013. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi penurunan pengangguran yang cukup besar pada perempuan yaitu dari 5,22 persen menjadi 2,80 persen pada tahun 2014. Dengan kata lain penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2014 lebih dipengaruhi oleh penurunan tingkat pengangguran perempuan seiring dengan menurunnya penduduk usia kerja perempuan yang mencari pekerjaan.

Gambar 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008–2014

e. Menurunnya Angka Kemiskinan.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya angka kemiskinan Tahun 2015 adalah 19,75% atau 96,20% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 20,58% dari seluruh penduduk.

Tabel 3.71 Capaian Kinerja Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya angka kemiskinan	24,57%	23%	20,19%	20,58%	19%	19,75%	96,20

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 24,57%. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 menjadi 23%. Pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 20,19%. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 20,58%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 19%.

Penduduk dikatakan miskin apabila pengeluarannya dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yaitu batas minimum makanan (setara 2100 kalori) ditambah dengan biaya pengeluaran untuk kebutuhan non makanan yang esensial seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi dan beberapa barang lainnya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 19,54 dari seluruh penduduk Purbalingga dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 275.022 per kapita/bulan, atau sejumlah 176.040 jiwa, menurun dari tahun 2013 sebesar 20,53 persen atau 181.100 jiwa. Salah satu faktor penyebab bertolak belakangnya presentase penduduk miskin dengan jumlah penduduk miskin dikarenakan naiknya garis kemiskinan Kabupaten Purbalingga, dimana pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 265.262 per kapita/bulan, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi Rp. 275.022 per kapita/bulan.

Tabel 3.72 Data Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	208.698	195.999	181.400	181.100	176.040
2	Persentase Penduduk Miskin (persen)	24,57	23,06	21,19	20,53	19,75

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar 13,58% dan Nasional sebesar 10,96%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga menempati posisi ke-4 tertinggi di Jawa Tengah.

Sasaran Ketiga : Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing tinggi; terus meningkatnya peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi

- a. Meningkatnya Kesejahteraan Petani yang Ditandai dengan Meningkatnya Nilai Tukar Petani.

Realisasi capaian indikator kinerja meningkatnya kesejahteraan petani yang ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani tahun 2015 sebesar 99,95 atau 90,86 % dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 105,55. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.73 Capaian Meningkatnya Kesejahteraan Petani yang Ditandai dengan Meningkatnya Nilai Tukar Petani Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya kesejahteraan petani yang ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani	107,8	102	99,04	105,55	110	99,95	90,86

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 107,8. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 menjadi 102. Pada tahun 2013 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 99,04. Akan tetapi

pada tahun 2014 naik menjadi 105,55. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat.

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator proxy yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani oleh berbagai pihak. Indeks Nilai Tukar Petani yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani menggambarkan kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Selain itu, NTP juga menggambarkan nilai tukar (term of trade) dari produk pertanian yang dihasilkan oleh petani terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi serta pembentukan barang modal. Semakin tinggi nilai NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

Sub sektor pertanian yang digunakan untuk menyusun Nilai Tukar Petani (NTP) Purbalingga meliputi sub sektor tanaman pangan (padi & palawija), hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman obat), tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan budidaya dengan menggunakan diagram timbang tahun 2015.

Tabel 3.74 Perkembangan Nilai Tukar Petani Purbalingga Per Sub Sektor Tahun 2015

Sub Sektor	2015									
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
Tanaman Pangan	99.06	99.38	99.40	98.95	98.98	98.98	98.62	98.84	99.16	99.57
Hortikultura	101.19	99.00	99.41	99.17	100.12	100.18	100.84	101.32	101.06	100.86
Tanaman Perkebunan Rakyat	98.57	98.71	99.35	99.28	98.73	98.63	99.21	99.16	99.12	99.11
Peternakan	101.51	101.52	101.72	101.60	101.60	101.56	101.70	101.94	102.27	101.84
Perikanan	99.64	98.83	99.01	99.17	99.40	99.73	99.49	99.88	99.49	99.80
NTP	99.67	99.67	99.77	99.43	99.53	99.55	99.37	99.62	99.85	100.06

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada periode tahun 2015 sub sektor hortikultura, dan peternakan hampir semuanya memiliki nilai indeks diatas 100. Sub sektor tanaman pangan, sub sektor tanaman perkebunan rakyat dan sub sektor perikanan justru memiliki nilai indeks dibawah 100. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015, petani sub sektor hortikultura, peternakan relatif mengalami surplus. Sedangkan petani sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat dan perikanan relatif mengalami defisit.

b. Meningkatnya Investasi di Sektor Agribisnis.

Realisasi capaian indikator kinerja meningkatnya investasi di sektor agribisnis tahun 2015 belum dapat terukur. Capaian tahun 2013 dan tahun 2014 juga belum bisa terukur. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.75 Capaian indikator Meningkatnya Investasi di Sektor Agribisnis Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya investasi di sektor agribisnis	N/A	5%	N/A	N/A	8%	N/A	65,21

Pada tahun 2011 belum bisa mengukur hasilnya. Pada tahun 2012 realisasinya adalah 5%. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 belum bisa mengukur hasilnya. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat 20%.

c. Menurunnya Penggunaan Pupuk dan Obat Kimia di Sektor Pertanian.

Realisasi capaian indikator kinerja menurunnya penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor Pertanian tahun 2015 adalah 5% atau 50% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 10,13%.

Tabel 3.76 Capaian indikator Menurunnya Penggunaan Pupuk dan Obat Kimia di Sektor Pertanian Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian	0,5% (20.900 ton)	25%	7%	10,13%	20%	-11%	100

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 0,5%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sangat besar dibandingkan tahun 2011 menjadi 25%. Pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012 menjadi 7%. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 10,13%. Realisasi pada tahun 2015 sebesar 5%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah menurun 20%.

Penggunaan pupuk pada tahun 2015 ditargetkan menurun menjadi 19.962 ton/ tahun. Akan tetapi realisasinya meningkat menjadi 22.195 ton. Purbalingga mempunyai lahan pertanian sebesar 217.391 ha. Para petani sampai saat ini masih percaya terhadap pupuk kimia yang langsung bisa dilihat hasilnya dibandingkan dengan pupuk organik. Disamping itu pula harga pupuk organik yang belum mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harganya belum terjangkau oleh petani dan akan meningkatkan biaya produksi. Dengan mendasarkan pada ketersediaan Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) dan Unit Pembuatan Pupuk Organik (UPPO) di kabupaten Purbalingga sebanyak 348 Unit serta Program/ Kegiatan Pertanian Organik dari Program Peningkatan Produksi, Produktifitas Mutu Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya ketrampilan petani dalam penggunaan pupuk organik, kurangnya ketersediaan pupuk organik dalam jumlah yang cukup dan kualitas pupuk organik yang perlu ditingkatkan. Sedangkan upaya yang dilakukan antara lain pelatihan petani dalam pembuatan pupuk organik dan bantuan analisa kandungan unsur hara dalam pupuk organik.

d. Meningkatnya angka kunjungan wisata.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya angka kunjungan wisata tahun 2015 adalah 1.835.808 atau 114,67% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 1.319.088. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.77 Capaian Indikator Meningkatnya angka kunjungan wisata Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya angka kunjungan wisata	1.507.707	1.021.253	1.458.513	1.319.088	1.600.000	1.834.808	114,67

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 1.507.707. Pada tahun 2012 menurun dibandingkan tahun 2011 menjadi 1.021.253. Pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012 menjadi 1.458.513. Sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 1.319.088. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat 20%.

Meningkatnya angka kunjungan wisata ke Kabupaten Purbalingga dikarenakan oleh bertambahnya jumlah tempat wisata di Purbalingga. Dengan program Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan wisata agri bisnis yang ada di Jawa Tengah, maka Kabupaten Purbalingga membuka beberapa obyek wisata yang belum pernah dijangkau oleh masyarakat luas. Faktor cuaca sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Purbalingga. Itu dikarenakan ada beberapa obyek wisata yang terletak di daerah pegunungan yang tingkat hujannya tinggi. Dan juga sekarang sudah ada beberapa daerah yang membangun objek wisata yang sama dengan Purbalingga. Sehingga para wisatawan memilih obyek wisata yang lebih dekat dengan daerah mereka masing-masing.

- e. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor-Sektor Pendukung Sektor Wisata (PDRB Hotel dan Restoran).

Realisasi capaian indikator kinerja meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB hotel dan restoran) tahun 2015 sebesar 11% atau 68,75 % dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 11%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat 40% tiap tahunnya.

Tabel 3.78 Capaian Indikator Meningkatnya Nilai Tambah Sektor-Sektor Pendukung Sektor Wisata (PDRB Hotel dan Restoran) Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB hotel dan restoran)	15,63%	15,2%	11%	11%	17%	11%	68,75

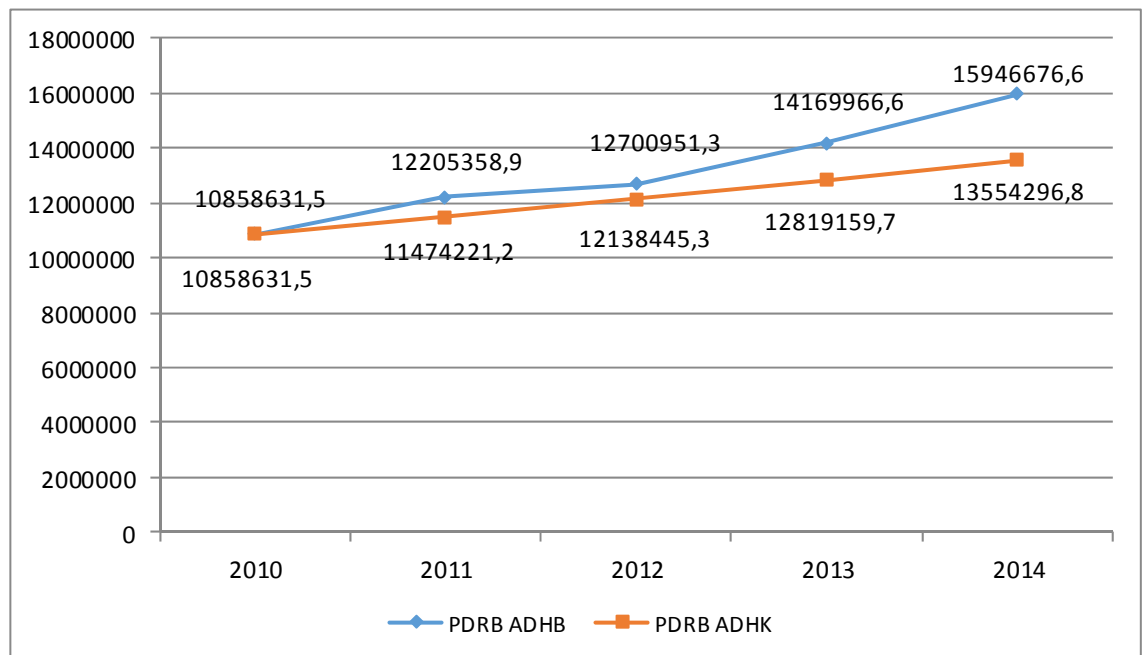
Pada tahun 2011 realisasinya adalah 15,63%. Pada tahun 2012 menurun dibandingkan tahun 2011 menjadi 15,2%. Pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 11%. Sedangkan pada tahun 2014 realisasinya sama dengan tahun 2013 yaitu 11%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat 40%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada saat ini menggunakan tahun dasar 2010.

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) dimana aktivitas ekonomi dibagi atas 9 sektor lapangan usaha, sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009, yang membagi aktivitas ekonomi menjadi 17 kategori.

Capaian PDRB di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010–2014. Kenaikan tersebut terjadi baik kepada capaian PDRB ADHB dan ADHK atas Dasar Tahun 2010. Perkembangan capaian PDRB dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.10 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2000 Kabupaten Purbalingga Tahun 2010–2014



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2014

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Walaupun demikian kategori Pertanian masih memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, tercatat hingga 2014 peranannya masih bertengger di 30 persen. Peranan terbesar selanjutnya di isi oleh kategori C, Industri Pengolahan yang berada pada kisaran 23,50 persen. Peranan terendah terjadi pada kategori D, Pengadaan Listrik dan Gas hingga 2014 hanya memberikan peran sebesar 0,05 persen. Perkembangan peranan/sumbangan sektor PDRB Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.79 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

Sektor	2010		2011		2012		2013		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.308.921,9	30,60	3.732.268,2	30,80	3.897.421,0	30,96	4.288.657,6	30,55	4.730.399,9	30,00
Pertambangan dan Penggalian	534.059,7	4,92	574.065,9	4,70	598.817,1	4,71	659.801,8	4,66	805.636,0	5,05
Industri Pengolahan	2.552.687,6	23,51	2.949.207,8	24,16	3.031.830,5	23,87	3.364.117,9	23,74	3.748.176,5	23,50
Pengadaan Listrik dan Gas	6.417,2	0,06	6.892,6	0,06	6.666,0	0,05	6.980,8	0,05	7.739,0	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16.912,1	0,16	17.087,2	0,14	17.114,8	0,13	17.364,6	0,12	17.822,9	0,11
Konstruksi	655.938,5	6,04	692.857,4	5,68	720.635,9	5,67	806.235,4	5,69	916.797,3	5,75
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.540.955,7	14,19	1.723.920,0	14,12	1.778.387,0	14,00	1.967.342,3	13,88	2.265.959,7	14,21
Transportasi dan Pergudangan	361.093,0	3,33	371.718,2	3,05	372.335,3	2,93	404.707,6	2,86	466.545,9	2,93

Sektor	2010		2011		2012		2013		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	260.964,1	2,40	277.406,3	2,27	284.256,3	2,24	314.237,2	2,22	343.884,5	2,16
Informasi dan Komunikasi	182.821,5	1,68	200.232,0	1,64	199.933,1	1,57	234.234,8	1,65	250.427,4	1,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	250.943,8	2,31	272.076,6	2,23	298.556,6	2,35	324.450,1	2,29	357.919,1	2,24
Real Estate	122.047,1	1,12	129.577,2	1,06	129.680,1	1,02	139.242,2	0,98	156.402,8	0,98
Jasa Perusahaan	14.723,1	0,14	17.144,4	0,14	17.853,4	0,14	20.653,3	0,15	24.967,5	0,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	362.513,5	3,34	372.399,3	3,05	419.518,9	3,30	441.084,8	3,11	489.698,5	3,07
Jasa Pendidikan	366.806,7	3,38	510.761,2	4,18	553.295,8	4,36	766.189,7	5,41	878.095,5	5,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.902,6	0,83	103.630,4	0,85	110.924,1	0,87	132.930,8	0,94	148.330,0	0,93
Jasa Lainnya	216.701,7	2,00	227.216,8	1,86	229.300,1	1,81	240.883,0	1,70	284.211,0	1,78

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2014

f. Meningkatnya Proporsi Sektor Industri dan Jasa dalam PDRB.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya proporsi sektor industri dan jasa dalam PDRB tahun 2015 sebesar 0,09% atau 45% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2015 yaitu sebesar 0,09%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat 10% tiap tahunnya.

Tabel 3.80 Capaian indikator Meningkatnya Proporsi Sektor Industri dan Jasa dalam PDRB Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Existing 2012	Capaian 2013	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Capaian %
Meningkatnya proporsi sektor industri dan jasa dalam PDRB	Meningkat 1,5%	0,1%	0,09%	0,09%	1,5%	0,09%	45

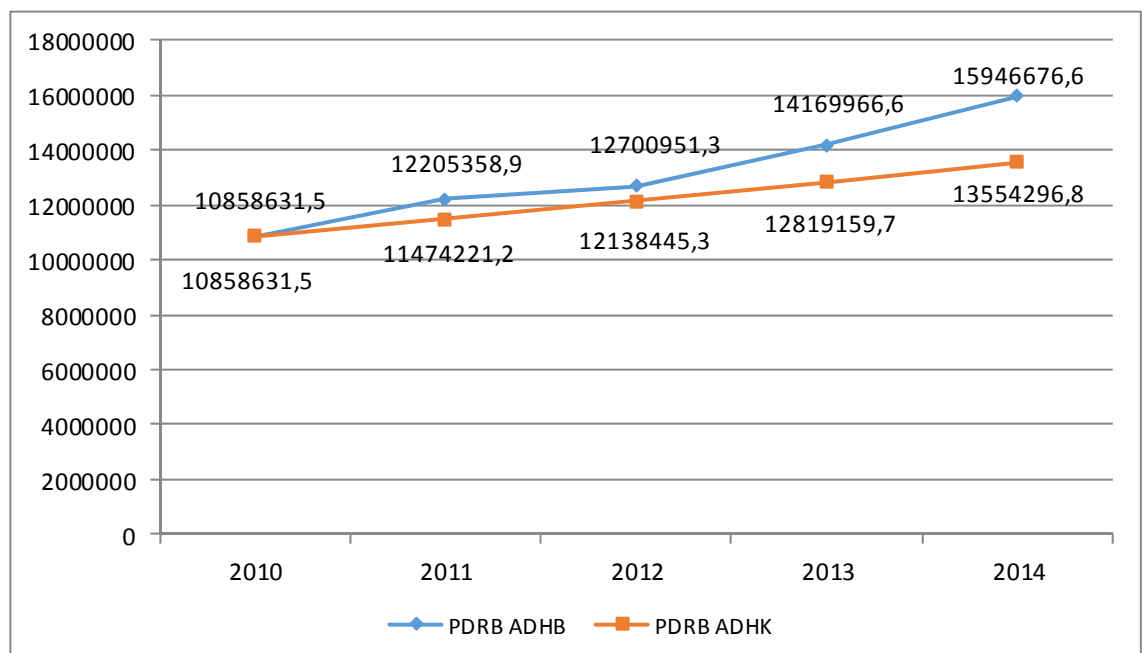
Pada tahun 2011 realisasinya adalah meningkat 1,5%. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 menjadi 0,1%. Pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 0,09%. Sedangkan pada tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2013 yaitu 0,09%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah diatas angka normatif.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi; pada saat ini menggunakan tahun dasar 2010.

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) dimana aktivitas ekonomi dibagi atas 9 sektor lapangan usaha, sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009, yang membagi aktivitas ekonomi menjadi 17 kategori.

Capaian PDRB di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010–2014. Kenaikan tersebut terjadi baik kepada capaian PDRB ADHB dan ADHK atas Dasar Tahun 2010. Perkembangan capaian PDRB dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 3.11 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2000 Kabupaten Purbalingga Tahun 2010–2014



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2014

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Walaupun demikian kategori Pertanian masih memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, tercatat hingga 2014 peranannya masih bertengger di 30 persen. Peranan terbesar selanjutnya di isi oleh kategori C, Industri Pengolahan yang berada pada kisaran 23,50 persen. Peranan terendah terjadi pada kategori D,

Pengadaan Listrik dan Gas hingga 2014 hanya memberikan peran sebesar 0,05 persen. Perkembangan peranan/sumbangan sektor PDRB Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.81 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

Sektor	2010		2011		2012		2013		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.308.921,9	30,60	3.732.268,2	30,80	3.897.421,0	30,96	4.288.657,6	30,55	4.730.399,9	30,00
Pertambangan dan Penggalan	534.059,7	4,92	574.065,9	4,70	598.817,1	4,71	659.801,8	4,66	805.636,0	5,05
Industri Pengolahan	2.552.687,6	23,51	2.949.207,8	24,16	3.031.830,5	23,87	3.364.117,9	23,74	3.748.176,5	23,50
Pengadaan Listrik dan Gas	6.417,2	0,06	6.892,6	0,06	6.666,0	0,05	6.980,8	0,05	7.739,0	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16.912,1	0,16	17.087,2	0,14	17.114,8	0,13	17.364,6	0,12	17.822,9	0,11
Konstruksi	655.938,5	6,04	692.857,4	5,68	720.635,9	5,67	806.235,4	5,69	916.797,3	5,75
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.540.955,7	14,19	1.723.920,0	14,12	1.778.387,0	14,00	1.967.342,3	13,88	2.265.959,7	14,21
Transportasi dan Pergudangan	361.093,0	3,33	371.718,2	3,05	372.335,3	2,93	404.707,6	2,86	466.545,9	2,93

Sektor	2010		2011		2012		2013		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	260.964,1	2,40	277.406,3	2,27	284.256,3	2,24	314.237,2	2,22	343.884,5	2,16
Informasi dan Komunikasi	182.821,5	1,68	200.232,0	1,64	199.933,1	1,57	234.234,8	1,65	250.427,4	1,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	250.943,8	2,31	272.076,6	2,23	298.556,6	2,35	324.450,1	2,29	357.919,1	2,24
Real Estate	122.047,1	1,12	129.577,2	1,06	129.680,1	1,02	139.242,2	0,98	156.402,8	0,98
Jasa Perusahaan	14.723,1	0,14	17.144,4	0,14	17.853,4	0,14	20.653,3	0,15	24.967,5	0,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	362.513,5	3,34	372.399,3	3,05	419.518,9	3,30	441.084,8	3,11	489.698,5	3,07
Jasa Pendidikan	366.806,7	3,38	510.761,2	4,18	553.295,8	4,36	766.189,7	5,41	878.095,5	5,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.902,6	0,83	103.630,4	0,85	110.924,1	0,87	132.930,8	0,94	148.330,0	0,93
Jasa Lainnya	216.701,7	2,00	227.216,8	1,86	229.300,1	1,81	240.883,0	1,70	284.211,0	1,78

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2014

g. Meningkatnya Jumlah Industri Kecil

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah industri kecil adalah 42.758 industri atau 99,43% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu 42.147 industri. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.82 Capaian Indikator Meningkatnya Jumlah Industri Kecil Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya jumlah industri kecil	38.080 industri	39.240 industri	41.930 industri	42.147 industri	43.000 industri	42.758 industri	99,43

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 38.080 industri. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 39.240 industri. Pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 41.930 industri. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 42.147 industri. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat.

Semakin mudahnya proses investasi di Purbalingga maka banyak investor yang masuk. Hal ini akan meningkatkan nilai ekonomi pada masyarakat. Meningkatnya industri kecil yang ada di Purbalingga akan membuka banyak lowongan pekerjaan bagi masyarakat khususnya yang berpendidikan rendah. Kegiatan yang dilakukan adalah promosi potensi daerah di berbagai event untuk menarik para investor-investor baru. Dengan demikian hal tersebut merupakan langkah awal untuk menjadikan Purbalingga menjadi kota industri. Untuk sekarang ini potensi daerah yang sedang digalakkan oleh Bapak Bupati Purbalingga adalah Batu Akik. Hal ini menyebabkan tumbuhnya industri kecil dan membuka lowongan pekerjaan.

Sasaran Keempat : Meningkatnya investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing, yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan

a. Meningkatnya Jumlah PMA.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah PMA tahun 2015 meningkat 2 perusahaan (23 perusahaan) atau 104,6% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih besar dari capaian tahun 2014 yaitu bertambah 2 perusahaan menjadi 23 perusahaan. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 bertambah setiap tahunnya.

Tabel 3.83 Capaian Meningkatnya jumlah PMA Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Capaian 2011	Capaian 2012	Capaian 2013	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Capaian %
Meningkatnya jumlah PMA	21 perusah aan	23 Perusah aan	20 Perusah aan	21 Perusah aan	22 Perusa haan	23 Perusah aan	104,6

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 21 perusahaan. Realisasi tahun 2012 meningkat 2 perusahaan menjadi 23 perusahaan. Pada tahun 2013 ada beberapa perusahaan yang dibeli oleh investor dalam negeri dan ada beberapa pula yang tutup sehingga menjadi 20 perusahaan. Pada tahun 2014 meningkat 1 perusahaan menjadi 21 perusahaan. Pada akhir periode RPJMD jumlah PMA yang ada di Kabupaten Purbalingga menjadi 23 perusahaan.

Dimasa yang akan datang, masih diperlukan adanya peningkatan dan masih banyak permasalahan yang dihadapi yaitu masih kurangnya regulasi bagi kegiatan/ usaha yang bersifat khusus dan sensitif bagi masyarakat serta efektifitas koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin terbatasnya lahan untuk kawasan industri yang sesuai dengan Perda Tata Ruang dan ketersediaannya dokumen tentang potensi dan peluang investasi di Purbalingga. Untuk meningkatkan investasi dilakukan dengan berbagai promosi investasi, kemudahan dan kecepatan pelayanan perijinan,

peningkatan Sumber Daya Manusia dan perumusan berbagai regulasi daerah yang bersifat khusus agar mendapatkan kepastian hukum.

b. Meningkatnya Nilai Investasi PMA.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya nilai investasi PMA tahun 2015 adalah Rp. 14.923.200.000,- atau 149,23% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu Rp. 3.512.100.000,-. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 bertambah setiap tahunnya.

Tabel 3.84 Capaian indikator Meningkatnya Nilai Investasi PMA Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya nilai investasi PMA	Rp. 154.514. 511.500	Rp. 35.800. 000.000	Rp. 29.581. 601.000	Rp. 3.512.1 00.000	Rp. 10.000. 000.000	Rp. 14.923. 200.000	149,23

Pada tahun 2011 realisasinya adalah Rp. 154.514.511.500,00. Realisasi tahun 2012 menurun menjadi Rp. 35.800.000.000,00. Pada tahun 2013 ada beberapa perusahaan yang dibeli oleh investor dalam negeri dan ada beberapa pula yang tutup sehingga menjadi Rp. 29.581.601.000,00. Pada tahun 2014 menjadi 3.512.100.000,00. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar Rp. 14.923.200.000,00.

Dimasa yang akan datang, masih diperlukan adanya peningkatan dan masih banyak permasalahan yang dihadapi yaitu masih kurangnya regulasi bagi kegiatan/ usaha yang bersifat khusus dan sensitif bagi masyarakat serta efektifitas koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin terbatasnya lahan untuk kawasan industri yang sesuai dengan Perda Tata Ruang dan ketersediaannya dokumen tentang potensi dan peluang investasi di Purbalingga. Untuk meningkatkan investasi dilakukan dengan berbagai promosi investasi, kemudahan dan kecepatan pelayanan perijinan, peningkatan Sumber Daya Manusia dan perumusan berbagai regulasi daerah yang bersifat khusus agar mendapatkan kepastian hukum.

c. Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten adalah Rp. 1.101.600,- atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.023.600,-. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah naik rata-rata sebesar 10%/tahun.

Tabel 3.85 Capaian indikator Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten	Rp. 765.000, -	67%	Rp. 895.500,-	Rp. 1.023. 600,-	Rp. 1.101. 600,-	Rp. 1.101. 600,-	100

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh diupayakan untuk semakin meningkatkan pemenuhan UMK terhadap KHL sesuai dengan komitmen bersama Unsur Tripartit. Berdasarkan survey kebutuhan layak hidup untuk pencapaian tahun 2015 masih jauh dari Kebutuhan Layak Hidup (KLH).

d. Menurunnya angka pengangguran.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2015 adalah 3.906 orang atau 86,8% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 3.906 orang dari seluruh penduduk usia kerja yang mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya investor yang masuk ke Purbalingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk usia bekerja di Purbalingga. Pada tahun 2015 jumlah perusahaan asing yang ada di Purbalingga bertambah sebanyak 2 perusahaan. Itu berimbas pada pembukaan lowongan pekerjaan bagi pencari kerja. Di daerah-daerah pedesaan saat ini banyak terdapat *plasma* atau anak cabang perusahaan. Banyak angkatan kerja yang tertampung di perusahaan tersebut.

Tabel 3.86 Capaian Kinerja Menurunnya angka pengangguran Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya angka pengangguran	4,54%	30,50%	3.123 orang	3.906 orang	4.500 orang	3.906 orang	86,8

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 4,54%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 30,50%. Pada tahun 2013 menjadi 3.123 orang. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.906 orang. Di tahun 2015 tenaga kerja yang dapat diterima diperusahaan yang ada di Purbalingga sebanyak 3.906 orang. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 4,5%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Data Sakernas 2014 mencatat bahwa tingkat pengangguran Kabupaten Purbalingga sebesar 5,13 yang artinya terdapat sebanyak 5,13 persen penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Menurut Sakernas, pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil.

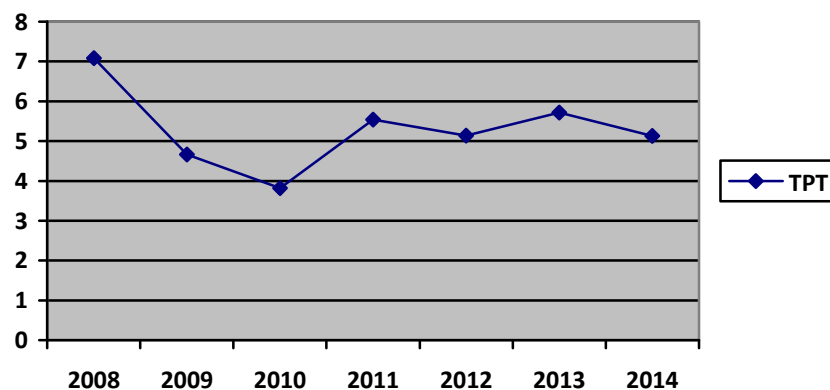
Tabel 3.87 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

Jenis Kelamin	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	6,10	6,82
Perempuan	5,22	2,80
Total	5,72	5,13

Sumber : Sakernas 2012-2013

Pada tahun 2014 persentase laki-laki yang menganggur lebih banyak dibanding perempuan demikian juga pada tahun 2013. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi penurunan pengangguran yang cukup besar pada perempuan yaitu dari 5,22 persen menjadi 2,80 persen pada tahun 2014. Dengan kata lain penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2014 lebih dipengaruhi oleh penurunan tingkat pengangguran perempuan seiring dengan menurunnya penduduk usia kerja perempuan yang mencari pekerjaan.

Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008-2014

Misi Kelima : **Sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Wilayah, Terutama untuk Mendorong Kesenjangan Pertumbuhan Antar Wilayah dan Pemerataan Pelayanan Sosial**

Sasaran Kesatu : Tersedianya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi.

a. Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang Beraspal.

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase panjang jalan kabupaten yang beraspal tahun 2015 adalah 710.204 km atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 703.352 km.

Tabel 3.88 Capaian indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang Beraspal
Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Persentase panjang jalan kabupaten yang beraspal	96,93%	698,454 (98,345)	700,354 km (98,61%)	703,564 km 98,61%	710,204 100%	710,204 km	100

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 96,93%. Realisasi tahun 2012 menurun menjadi 698.454 km atau 98,345%. Pada tahun 2013 realisasinya meningkat menjadi 700.354 km atau 98,61%. Pada tahun 2014 sama dengan tahun 2013 yaitu 703,564 km. Realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar 710,204 km atau sudah seluruh jalan di Kabupaten Purbalingga sudah beraspal. Pada tahun ini sudah mencapai yang ditargetkan oleh RPJMD adalah 96,5%.

b. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik.

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2015 adalah 587.983 km (78,72%) atau 112,73% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 431.558 km (60,77%). Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 masih lebih rendah dari target akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu 70% dari jumlah panjang jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.89 Capaian indikator Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	44,82%	387,262 (54,52%)	431,558 (60,77%)	515,250 (72,55%)	521,558 (73,44%)	587,983 (74,98%)	112,73

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 44,82%. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 387,262 km atau 54,52%. Pada tahun 2013 realisasinya meningkat menjadi 431,558 km atau 60,77%. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 515,250 km atau 72,55%. Pada tahun 2015 capaiannya adalah sebesar 587,983 km atau 74,98% dari jumlah jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Purbalingga.

c. Panjang Jembatan.

Realisasi capaian indikator kinerja Panjang jembatan tahun 2015 adalah 2.884,8 m atau 101,03% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 2.706,8 m.

Tabel 3.90 Capaian indikator Panjang Jembatan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Panjang jembatan	2.504,8 m	2.542,8 m	2.500,8 m	2.706,8 m	2.884,8 m	2.914,6 m	101,03

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 2.504,8 m. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 2.542,8 m. Pada tahun 2013 realisasinya menjadi 2.500,8 m, itu dikarenakan ada beberapa jembatan yang dibongkar dan pembangunannya belum selesai pada akhir tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.706,8 m. Pada masa akhir periode RPJMD pada tahun 2015 sebesar 2.914,6 m.

Panjang jembatan yang ada di Purbalingga adalah 2.914,8 m. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga yaitu Sungai Ponggawa, Sungai Gemuruh, Sungai Kaja, Sungai Lembereng, Sungai Tlahab, Sungai Sosos, Sungai Lebak, Sungai Tungtung Gunung, Sungai Laban, Sungai Kuning, Sungai Witan, Sungai Ginyung, Sungai Tambra dan Sungai Muli serta sungai yang mengalir disekitar Kabupaten Purbalingga yaitu sungai Pekacangan, Sungai Serayu dan Sungai Klawing. Jembatan yang ada di Kabupaten Purbalingga sejumlah 271 buah yang terbagi menjadi beberapa kriteria jembatan yaitu baik sekali sepanjang 478,05 m; rusak ringan sepanjang 1.814,30 m; rusak sepanjang 290,70 m dan rusak berat sepanjang 123,75 m.

d. Meningkatnya Luas Lahan Beririgasi Teknis dan Setengah Teknis

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya luas lahan beririgasi teknis dan setengah teknis tahun 2015 sebanyak 11.547,249 ha beririgasi teknis dan 3.746,251 ha yang setengah teknis atau 100,1% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu sebanyak 11.232,68 ha beririgasi teknis dan 3.640,576 ha yang setengah teknis. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat kualitas dan kuantitasnya.

Tabel 3.91 Capaian indikator Meningkatnya Luas Lahan Beririgasi Teknis dan Setengah Teknis Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya luas lahan beririgasi teknis dan setengah teknis	3.640,57 6 ha	11.232, 56 ha 3.640,5 76 ha	11.232, 68 ha 3.640,5 76 ha	11.232, 593 ha 3.646,2 51 ha	11.547, 245 ha 3.746,2 51 ha	11.547, 249 ha 3.746,2 51 ha	100,1

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 3.640,576 ha. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 11.232,56 ha yang beririgasi teknis dan 3.640,576 ha yang beririgasi setengah teknis. Pada tahun 2013 realisasinya menjadi meningkat menjadi 11.232,68 ha yang beririgasi teknis dan 3.640,576 ha yang beririgasi setengah teknis. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 11.232,593 ha yang beririgasi teknis dan 3.640,576 ha yang beririgasi setengah teknis. Pada tahun 2015 capaian akhir RPJMD sebanyak 11.457,245 ha yang beririgasi teknis dan 3.746,251 ha yang beririgasi setengah teknis. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah meningkat.

Jaringan irigasi adalah suatu hal yang sangat penting untuk kemajuan pertumbuhan pertanian guna mendukung program pemerintah yaitu swasembada pertanian. Pembangunan irigasi yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sampai saat ini belum maksimal karena masih banyaknya kerusakan yang terjadi pada saluran irigasi baik teknis maupun setengah teknis. Sedangkan perbaikan yang dilakukan masih sangat terbatas. Letak geografis Purbalingga ada

beberapa daerahnya yang merupakan pegunungan merupakan daerah mata air juga merupakan salah satu keuntungan bagi purbalingga untuk membuka saluran irigasi baru. Disamping itu juga masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain penambahan personil untuk mengecek setiap jalur irigasi.

e. Jumlah Prasarana Pelayanan Kesehatan.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah prasarana pelayanan kesehatan tahun 2015 sebanyak PKD 199 unit, Pustu 49 unit, Puskesmas 22 unit atau 97,89% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebanyak PKD 189 unit, Pustu 49 unit, Puskesmas 22 unit. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat kualitas dan kuantitasnya.

Tabel 3.92 Capaian Indikator Jumlah Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Jumlah prasarana pelayanan kesehatan	PKD 177 unit, puskesmas 22 unit	PKD 204 unit, Pustu 48 Puskesmas 22 unit,	PKD 189, Pustu 49, Puskesmas 22 unit	PKD 199, Pustu 48, Puskesmas 22 unit	PKD 204, Pustu 49, Puskesmas 22 unit	PKD 199, Pustu 48, Puskesmas 22 unit	97,89

Kondisi sarana pelayanan kesehatan dasar pada saat ini dari 239 desa/ kelurahan dirasa masih kurang. Artinya belum seluruh desa/ kelurahan tersedia sarana pelayanan kesehatan dasar. Perlu dilakukan akselerasi penambahan jumlah sarana dan prasarana kesehatan dasar di seluruh desa/ kelurahan.

f. Jumlah Prasarana Pelayanan Pendidikan.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah prasarana pelayanan pendidikan tahun 2015 Ruang kelas SD/ MI 4.426, SMP/ MTs 1.498, SMA/SMK/MA 894 ruang kelas atau 104,74 % dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu Ruang kelas SD/ MI 5.265, SMP/ MTs 1.458, SMA/ SMK/ MA 820 ruang kelas. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.93 Capaian indikator Jumlah Prasarana Pelayanan Pendidikan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Jumlah prasarana pelayanan pendidikan	Ruang kelas SD/ MI 4.388, SMP/ MTs 1.267, SMA/ SMK/ MA 641 ruang kelas	Ruang kelas SD/ MI 4.217, SMP/ MTs 1287, SMA/ SMK/ MA 694 ruang kelas	Ruang kelas SD/ MI 4477, SMP/ MTs 1398, SMA/ SMK/ MA 796 ruang kelas	Ruang kelas SD/ MI 5.265, SMP/ MTs 1.458, SMA/ SMK/ MA 820 ruang kelas	Ruang kelas SD/ MI 5.290, SMP/ MTs 1463, SMA/ SMK/ MA 841 ruang kelas	Ruang kelas SD/ MI 4.426, SMP/ MTs 1.498, SMA/ SMK/ MA 894 ruang kelas	104,74

g. Jumlah Pasar Tradisional.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah pasar tradisional tahun 2015 sebanyak 19 pasar atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014 yaitu sebanyak 19 pasar. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak 36 pasar. Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 hanya merenovasi pasar yang sudah ada dan tidak membangun pasar baru.

Tabel 3.94 Capaian indikator Jumlah pasar tradisional Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Jumlah pasar tradisional	34	19	19	19	19	19	100

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 34 pasar. Realisasi tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 capaiannya sama yaitu 19 pasar. Itu disebabkan karena yang didata oleh Pemerintah Daerah adalah pasar-pasar yang dikelola oleh pemda saja.

Sasaran Kedua : Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman

a. Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya luasan kawasan kumuh tahun 2015 tidak ada atau 100% dari target yang ditentukan. Di Purbalingga sudah tidak ada kawasan kumuh. Itu dikarenakan sudah banyaknya bantuan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain PNPM yang diberikan kepada desa/ kelurahan dan Program Usri berupa pembangunan sarana sanitasi berupa IPAL Komunal dengan perpipaan yang bersumber dana dari APBN dengan pendampingan masing-masing SKPD.

Tabel 3.95 Capaian indikator Menurunnya luasan kawasan kumuh Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya luasan kawasan kumuh	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	100

b. Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni tahun 2015 sebanyak 747 rumah atau 136,37% dari target yang ditentukan sebanyak 13.858 rumah. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2013 yaitu sebanyak 4,4% dari jumlah 13.858 rumah. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak tidak ada rumah yang tidak layak huni.

Tabel 3.96 Capaian indikator Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	4,12%	6,98% (turun 1.216)	Menurun 4,4% (13.858)	6% (847)	5%	747 rumah	136,36

Dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang merupakan program Kemenpera untuk mendorong Pemda dalam memfasilitasi penyelenggaraan perumahan swadaya serta membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat menempati rumah dan lingkungan yang layak huni. Disamping bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga mengeluarkan kebijakan di sektor perumahan dan permukiman yaitu program PSPP Gakin (Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin) yang digulirkan Pemkab Purbalingga sejak tahun 2003.

c. Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya rumah tangga bersanitasi tahun 2015 adalah 80,28% atau 95,91% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 77,31%.

Tabel 3.97 Capaian indikator Meningkatnya rumah tangga bersanitasi Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	86%	61,3%	74,89%	77,31%	83,70%	80,28%	95,91

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 86%. Realisasi tahun 2012 menurun menjadi 61,3%. Pada tahun 2013 realisasinya meningkat menjadi 74,89%. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 77,31%. Pada tahun 2015 akhir masa RPJMD capaiannya meningkat menjadi 80,28%. Capaian tersebut sudah memenuhi target yang ditentukan RPJMD. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah 80%.

Salah satu faktor yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah

tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/ tinja) sudah mulai membaik. Namun jumlah rumah di Kabupaten Purbalingga yang mempunyai akses sanitasi pada tahun 2015 adalah sebesar 80,28%.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2014, desa di Kabupaten Purbalingga mendapatkan program USRI (Urban Sanitation and Rural Infrastructure) untuk kawasan perkotaan dan Program Kegiatan Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

d. Meningkatnya Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya rumah tangga menggunakan air bersih tahun 2015 sebesar 90,12% atau 90,12% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 85,63%.

Tabel 3.98 Capaian Indikator Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya rumah tangga menggunakan air bersih	80,60%	86,7%	99,48%	85,63	100%	90,12%	90,12

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 80,60%. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 86,70%. Pada tahun 2013 realisasinya menjadi 99,48%. Pada tahun 2014 menurun menjadi 85,63%. Pada tahun 2015 capaiannya sebesar 90,12%. Capaian tersebut sudah mencapai target akhir yang direncanakan pada akhir masa RPJMD. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah 90%.

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktifitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Air bersih dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk segala kegiatan mereka. Sehingga perlu diketahui bagaimana air dikatakan bersih dari segi kualitas dan bisa digunakan dalam jumlah yang memadai dalam kegiatan sehari-hari oleh

manusia. Ditinjau dari segi kualitas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya kualitas fisik yang terdiri atas pH, kesadahan dan sebagainya serta kualitas biologi dimana air terbebas dari mikroorganisme yang menyebabkan terjadinya penyakit. Agar kelangsungan hidup manusia dapat berjalan lancar, air bersih harus tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan aktifitas manusia pada tempat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.

Di Kabupaten Purbalingga rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2013 mencapai 90,12%. Ada beberapa program untuk mencapainya diantaranya adalah :

- 1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) pada 8 desa
- 2) Penambahan jaringan pipa air bersih pedesaan
- 3) Adanya program Pamsimas

e. Meningkatnya Cakupan Air Bersih Perpipaan.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya cakupan air bersih tahun 2015 sebesar 49.784 SR atau 123,84% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 49.200 SR. Capaian tahun 2015 sudah melampaui target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 43.000 SR.

Tabel 3.99 Capaian indikator Meningkatnya Cakupan Air Bersih Perpipaan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan	27.825 SR	29.110 SR	44.349 SR	40.200 SR	40.200 SR	49.784 SR	123,84

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 27.825 SR. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 29.110 SR. Pada tahun 2013 realisasinya menjadi 44.349 SR. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 40.200 SR. Pada tahun 2015 capaiannya meningkat sebesar 49.784 SR. Capaian tersebut sudah mencapai target akhir yang ditetapkan oleh RPJMD.

Jaringan air bersih ini selain dari jaringan PDAM yang melayani air bersih perkotaan tetapi ada juga melalui program kegiatan yang berada di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang pada DPU Kabupaten Purbalingga. Program tersebut antara lain Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) dan Program Pamsimas yang melayani air bersih pedesaan.

Bentuk penyediaan air bersih pedesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur bor serta pembangunan brancapting maupun tower.

f. Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya cakupan layanan persampahan tahun 2015 adalah 170,75 m³/hr 285,11 m³/hr atau 85,20% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 160 m³/hr 262 m³/hr.

Tabel 3.100 Capaian indikator Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya cakupan layanan persampahan	150,2 <u>m³/hr</u> 193,48 m ³ /hr	152 <u>m³/hr</u> 193,48 m ³ /hr	152,50 <u>m³/hr</u> 194,90 m ³ /hr	160 <u>m³/hr</u> 262 m ³ /hr	210 <u>m³/hr</u> 320 m ³ /hr	170,75 <u>m³/hr</u> 285,11 m ³ /hr	85,20

Volume sampah yang ditangani oleh Bidang Kebersihan pada DPU Kabupaten Purbalingga adalah 170,75 m³/hr. TPA yang ada di Kabupaten Purbalingga melayani 10 Kecamatan yang ada disekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat maka jumlah sampah yang akan dilayani semakin banyak.

Antisipasi yang perlu dilakukan terutama terkait dengan keterbatasan daya tampung TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang harus memenuhi persyaratan teknis tertentu (TPA sanitasi/ Landfill/ Control Landfill) yang perlu biaya besar untuk pembangunan dan operasionalnya. Juga perlu adanya kesadaran dari masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah.

g. Tempat pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk

Realisasi capaian indikator kinerja Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk tahun 2015 adalah 0,17 m³/penduduk atau 85% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 0,17 m³/penduduk.

Tabel 3.101 Capaian indikator Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	0,26 m ³ /penduduk	0,16 m ³ /penduduk	0,17 m ³ / penduduk	0,20 m ³ / penduduk	0,17 m ³ / penduduk	85

Manusia setiap harinya merupakan produsen sampah. Baik yang berupa sampah organik maupun sampah non organik. Dengan adanya laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut membawa dampak ikut meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Disamping peningkatan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan keberagaman aktifitas masyarakat turut pula berpotensi untuk meningkatkan volume timbulan sampah. Dengan kata lain semakin kedepan sampah akan menjadi potensi masalah yang krusial yang perlu segera diantisipasi dan dicarikan solusi permasalahannya.

Sasaran Ketiga : Terpenuhinya pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berbagai aktivitas sosial ekonomi.

a. Meningkatnya Rasio Elektrifikasi.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2015 adalah 82,70% atau 97,29% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 82,70%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 diharapkan akan meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.102 Capaian indikator Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya rasio elektrifikasi	98,30%	98,40%	98,41%	82,70%	85%	82,70%	97,29

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 98,30%. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 98,40%. Pada tahun 2013 realisasinya menjadi 98,41. Pada tahun 2014 menurun menjadi 82,70%. Realisasi yang dicapai pada tahun 2015 sebesar 82,70% dari seluruh Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga yang ada. Berdasarkan hasil survei tahun 2010 oleh Konsultan Penyusun Rencana Umum Pengelolaan Energi Daerah (RUPED), rasio elektrifikasi tahun 2010 adalah sebesar 98,30% dengan asumsi bahwa rumah tangga dianggap berlistrik bila sudah menikmati energi listrik walaupun tidak mempunyai KWH meter sendiri. Dengan adanya Listrik masuk desa baik yang didanai oleh APBN (oleh PLN), APBD Provinsi (Dinas ESDM Prov) dan APBD Kabupaten (Bidang ESDM, DPU), jaringan listrik semakin bertambah dan jumlah sambungan baru semakin bertambah, sehingga jumlah rumah tangga berlistrik semakin meningkat dan Rasio Elektrifikasinya meningkat. Target pada tahun 2015 adalah sebesar 85% namun capaian tahun 2015 sebesar 82,70%. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan asumsi dalam perhitungannya. Sebelumnya jumlah rumah tangga berlistrik dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berlistrik walaupun belum memiliki meteran sendiri. Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga yang berlistrik dihitung hanya yang sudah mempunyai meteran sendiri.

b. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Kayu Bakar.

Tabel 3.103 Capaian Indikator Jumlah Rumah Tangga Pengguna Kayu Bakar Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Jumlah rumah tangga pengguna kayu bakar	Menurun	Menurun	Tidak ada	menurun	Menurun	menurun	100

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah rumah tangga pengguna kayu bakar tahun 2015 adalah tidak ada atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2015 yaitu tidak ada. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 tidak ada penduduk yang menggunakan kayu bakar.

Data pengguna kayu bakar secara real tidak ada. Namun dengan asumsi meningkatnya penggunaan elpiji 3 kg, maka pengguna kayu bakar semakin berkurang. Saat ini terdapat 2 SPBE yang memasok 7 agen elpiji 3 kg yang ada di Purbalingga yaitu :

- 1) SPBE yang ada di Purbalingga
 - PT. Indo Marketing World, Bojongsari;
 - PT. Serayu Gas Abadi, Bukateja.
- 2) Agen Elpiji 3 kg yang ada di Purbalingga
 - PT. Asrikin Putra Perkasa, Purbalingga
 - PT. Asri Jaya Raharja, Purbalingga
 - PT. Sri Wijaya Indah, Kalimanah
 - PT. Setyo Mulyo Santosa, Purbalingga
 - PT. Bumi Margo Mulyo, Kemangkon
 - PT. Jasa Migas Sejahtera, Kaligondang
 - PT. Energi mitra Tama Abadi, Bobotsari

Pemakaian elpiji 3 kg di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2015 mencapai angka 17.260 tabung/ hari. Permintaan kuota elpiji 3 kg ke PT. Pertamina

Persero pata tahun 2014 sebanyak 13.500 tabung/ hari menjadi 18.148 tabung/ hari pada tahun 2015, serta ditunjang dengan pengawasan dan pengendalian distribusi elpiji 3 kg.

Sasaran Keempat : Terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern untuk mewujudkan masyarakat informasi.

a. Jumlah Desa tidak Terjangkau Layanan Telekomunikasi.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah desa tidak terjangkau layanan telekomunikasi tahun 2015 adalah 2 desa atau 50% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014 yaitu sebanyak 2 desa. Capaian tersebut tidak memenuhi capaian akhir RPJMD Tahun 2015. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 tidak ada desa yang tidak terjangkau layanan komunikasi.

Tabel 3.104 Capaian Indikator Jumlah Desa tidak Terjangkau Layanan Telekomunikasi Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Jumlah desa tidak terjangkau layanan telekomunikasi	0	0	0	2	1	2	50

Telekomunikasi merupakan kebutuhan bagi setiap penduduk untuk mengetahui kondisi disekitar lingkungannya. Kondisi geografis di Purbalingga yang terdiri dari dataran rendah dan pegunungan sangat sulit untuk pemeratakan jaringan telekomunikasi. Ada beberapa desa yang sampai saat ini tidak dapat terjangkau oleh jaringan kabel dari Telkom dan belum terjangkau oleh jaringan telepon selular. Pemerintah saat ini sudah mengupayakan kemudahan akses telekomunikasi dan internet masuk desa di seluruh kecamatan-kecamatan melalui kegiatan program internet masuk desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

b. Jumlah Warung Internet.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah warung internet tahun 2015 adalah 60 atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu 104.

Tabel 3.105 Capaian indikator Jumlah Warung Internet Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Jumlah warung internet	84	106	106	104	60	60	100

Dengan semakin mudahnya mengakses internet maka perkembangan warung internet yang ada semakin memprihatinkan. Hal ini mengakibatkan sepi pengunjung di beberapa warung internet, sehingga banyak warung internet yang tutup. Melalui kegiatan monitoring warnet dapat diketahui bahwa pada saat ini jumlah warnet semakin menurun/ sedikit, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih mengakses internet melalui *gadget* yang aplikasinya semakin canggih dan mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai macam informasi melalui internet dan harganya semakin terjangkau oleh lapisan masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan sosialisasi internet sehat melalui kegiatan monitoring dan pembinaan serta pembuatan poster pengguna internet sehat sesuai UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Jumlah Hot Spot Area di Ruang Publik.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah hot spot area tahun 2015 adalah 80 hot spot di ruang publik atau 145,45% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sejumlah 16 hot spot di ruang publik. Pencapaian realisasi indikator kinerja tersebut dari tahun ketahun semakin meningkat, sehingga sudah sesuai dengan target akhir pencapaian Renstra yang ditetapkan yaitu meningkat setiap tahunnya .

Tabel 3.106 Capaian Indikator Jumlah Hot Spot Area Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2014	Capaian %
Jumlah hot spot area diruang publik	6	8	13	16	55	80	145,45

Tingginya kebutuhan akan informasi pada saat ini memang sangat tinggi. Terutama anak muda yang selalu menjadikan media sosial digunakan untuk berhubungan dengan para sahabatnya. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, sekarang ini untuk dapat mengakses internet kita tidak perlu harus susah payah ke warnet. Hampir setiap area umum saat ini tersedia hot spot area. Dengan kondisi tersebut kita sangat dipermudah dan dapat bebas untuk mengakses internet tanpa harus membayar. Masyarakat dapat mengakses internet secara wireless (nirkabel/ tanpa kabel) dari PC, Laptop, Note Book ataupun Gadged dalam jangkauan radius kurang lebih beberapa ratus meter, tergantung dari kekuatan frekwensi atau signalnya. Di Instansi Pemerintah, sekolah, rumah makan maupun tempat umum lainnya, kita sudah bisa dengan mudah mengakses internet dengan fasilitas wireless yang telah disediakan. Untuk kalangan swasta ini adalah sebagai salah satu penarik para pengunjung untuk datang paada suatu tempat, sehingga dari tujuan pelaku bisnis untuk menarik pengunjung yang sebanyak-banyaknya guna memperlancar bisnis mereka.

Tabel 3.107 Hot Spot Area Yang Ada di Kabupaten Purbalingga

NO	NAMA	NO	NAMA
1.	kesbangpol	41.	aldynet
2.	linggakab1	42.	efjinet
3.	linggakab2	43.	flashone
4.	linggakab3	44.	.ijo adv,
5.	linggakab4	45.	wifi corner telkom
6.	linggakab5	46.	alfamart
7.	gedungA	47.	magelang putra
8.	el pe es e	48.	rsu HI

NO	NAMA	NO	NAMA
9.	lpse-pbg	49.	takaful
10.	lpse	50.	top one
11.	balaidesa kedungbenda	51.	top bmt
12.	bappeda free	52.	toko mas ani
13.	bappeda perpustakaan	53.	valensia net
14.	aset dppkad	54.	biznet
15.	kpad	55.	ayam penyet suroboyo
16.	lp	56.	rumah makan klawing
17.	kominfo	57.	rumah makan noni
18.	ulp_pbg	58.	cross klawing
19.	dinhubkominfo	59.	d'aploen
20.	ruang kadishub	60.	davos
21.	griya umkm	61.	milk mania
22.	lentera	62.	rm klawing
23.	kim palawa	63.	sambel godres
24.	man purbalingga	64.	selera
25.	inspektorat	65.	yosi mandiri
26.	kpp purbalingga	66.	mikrotik1, (SMK 1 pbg)
27.	pendopo	67.	mikrotik2, (SMK 1 pbg)
28.	pendopo pbg	68.	mikrotik3, (SMK 1 pbg)
29.	oproom	69.	smega hotspot
30.	polres pbb	70.	SMEGA HOTSPOT
31.	perwira4	71.	Smega Hotspot
32.	pusk krjambu	72.	hotspot TU SMK
33.	sd jetis	73.	ruang guru1
34.	smk ypt 1	74.	ruang guru2
35.	smk ypt 2	75.	ruang guru3
36.	smk 3 pbg	76.	indi school
37.	radio swara perwira	77.	wifi id 1
38.	terminal purbalingga	78.	wifi id 2
39.	kecamatan rembang	79.	yms (yamaha mataram sakti)
40.	radio ardi lawet	80.	TKJ OKE

d. Jumlah Jenis Pelayanan Publik Secara Online

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah jenis pelayanan publik secara online tahun 2015 adalah 29 (1 Website Purbalingga, 26 sub domain, 1 sistem surat elektronik, LPSE) atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu 27 (1 Website Purbalingga, 24 sub domain, 1 sistem surat elektronik, LPSE). Realisasi RPJMD 2010 – 2015 cenderung meningkat. Realisasi tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan RPJMD.

Upaya untuk mengelola Sub Domain dengan pelatihan update website, namun pada prakteknya ada beberapa SKPD yang tidak aktif mengakses karena keterbatasan personil.

Tabel 3.108 Capaian Indikator Jumlah Jenis Pelayanan Publik Secara Online Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Jumlah jenis pelayanan publik secara online	3	25	25	27	29	29	100

e. Persentase Instansi Pemerintah Menggunakan Teknologi Informatika

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase instansi pemerintah menggunakan teknologi informatika tahun 2014 adalah 100% atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dibandingkan capaian tahun 2013 yaitu 100%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 meningkat.

SKPD di Kabupaten Purbalingga sudah menggunakan teknologi informatika pada pelaksanaan administrasi sehari-hari. Ada beberapa SKPD yang sudah menggunakan aplikasi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Tabel 3.109 Capaian Indikator Persentase Instansi Pemerintah Menggunakan Teknologi Informatika Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Persentase instansi pemerintah menggunakan teknologi informatika	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

Misi Keenam : **Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Hayati.**

Sasaran Kesatu : Terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta pulihnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat

a. Menurunnya Luas Lahan Kritis.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya luas lahan kritis pada kawasan lindung tahun 2015 adalah 3,68% atau 112% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu 4,71%. Luas lahan kritis diluar kawasan hutan di Purbalingga untuk fungsi hutan lindung agak kritis seluas 6.353,2 Ha dan yang kritis seluas 887,3 Ha. Rehabilitasi hutan dikawasan hutan lindung dengan pembangunan kebun bibit rakyat (KBR) dan penanaman pohon untuk konservasi yang bersumber dari DAS Serayu Opak Progo Yogyakarta.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya luas lahan kritis pada kawasan budidaya pertanian tahun 2015 adalah 10% atau 200% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu 4,71%. Rehabilitasi hutan dikawasan budidaya dengan pembangunan

sipil teknis (cek dam/ dam penahan, guly plug, sumur resapan) dan penanaman pohon (tanaman yang berfungsi untuk konservasi dan menghasilkan buah) dikawasan budidaya.

Tabel 3.110 Capaian Indikator Menurunnya Luas Lahan Kritis Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya luas lahan kritis							
▪ Persentase lahan kritis di kawasan lindung	4%	7,66%	7%	4,71%	3%	3,68%	122
▪ Presentase Lahan kritis di kawasan budidaya pertanian	1%	21,34%	17%	4,71%	5%	10%	200

b. Menurunnya Tingkat Pencemaran Udara, Air dan Tanah.

Tabel 3.111 Capaian Indikator Menurunnya Tingkat Pencemaran Udara, Air dan Tanah Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya tingkat pencemaran udara, air dan tanah	Dibawah ambang batas	Dibawah ambang batas (50%)	Udara : 8/8 Air : 36/45 Tanah : 0	Udara : 10/10 Air : 20/20 Tanah : 0	100%	Udara : 18/18 Air : 30/30 Tanah : 0	100%

1) UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR

Perkembangan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya sektor industri menyebabkan terjadinya peningkatan polusi pada badan air yang banyak dijadikan areal pembuangan limbah, baik industri kecil maupun

industri berskala menengah ke atas. Hal inilah yang menjadikan perlunya dilakukan tindakan pemantauan secara rutin. Pemantauan bisa dilaksanakan oleh instansi terkait yang dibantu oleh semua lapisan masyarakat. Pemantauan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran pada badan air yang nantinya dapat berdampak serius terhadap kelangsungan hidup manusia. Jika terjadi pencemaran sebagaimana dimaksud maka pembangunan berkelanjutan tidak akan berhasil tanpa memasukkan unsur konservasi lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan.

Pengelolaan sumber daya air membutuhkan pendekatan yang holistik, berdasarkan partisipatori yang melibatkan pengguna, perencana, dan penentu kebijakan mengingat air dalam keadaan tertentu sudah menjadi benda yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan holistik sumberdaya air dengan titik tolak pemikiran bahwa air sebagai sumberdaya alam yang rentan dan merupakan bagian integral dari lingkungan hidup, benda sosial yang sekaligus mempunyai nilai ekonomi. Penetapan alokasi air hendaknya menerapkan pengelolaan permintaan, mekanisme harga dan pelaksanaan pengaturan dengan memperhatikan keterpaduan lintas sektor.

Perkembangan investasi dan industri yang begitu mencolok berdampak pada perubahan lingkungan, terutama lingkungan perairan yang banyak digunakan sebagai areal pembuangan limbah. Sektor industri memiliki kecenderungan terus berkembang, sehingga pada masa mendatang dimungkinkan akan dapat menjadi sektor basis. Perkembangan ini sangat luar biasa dan berdampak positif bagi perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Dibalik dampak positif pada perekonomian yang besar ini, dampak negatif juga mengancam wilayah Purbalingga. Longgarnya perijinan diikuti dengan longgarnya penegakan hukum yang ada. Banyak kegiatan usaha/ industri, bahkan yang berskala besar sekalipun yang tidak memiliki IPAL, AMDAL, UKL-UPL dan prosedur lingkungan lainnya, padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Tujuan dilakukannya Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Limbah Cair di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 adalah antara lain untuk mengetahui kualitas dan potensi dampak limbah cair yang dibuang ke lingkungan oleh pelaku kegiatan usaha/industri dengan menggunakan beberapa parameter fisika dan kimia. Adapun kegunaan dilaksanakannya kegiatan Pemantauan

Kualitas Air Sungai dan Limbah Cair ini adalah sebagai bagian dari upaya mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi lingkungan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan penegakan hukum yang berkorelasi positif dengan pelestarian lingkungan terutama lingkungan perairan.

Berikut ini hasil pemantauan berdasarkan uji laboratorium lingkungan terhadap 2 kelompok objek pemantauan, yaitu kualitas air sungai, dan kualitas limbah cair industri.

a) Pemantauan Kualitas Air Permukaan (Air Sungai)

Hasil uji laboratorium terhadap 14 titik sampling air sungai di Kabupaten Purbalingga menunjukkan terdapat beberapa parameter kimia diatas baku mutu yang dipersyaratkan, antara lain parameter BOD, COD, tembaga dan Klor Bebas, sedangkan untuk parameter fisika semua masih memenuhi ambang batas normal. Banyak parameter kimia yang diatas baku mutu, salah satunya sebagai akibat belum adanya penetapan kelas air terhadap air permukaan (termasuk sungai) di Kabupaten Purbalingga, sehingga berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II yang lebih selektif, sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, yaitu: “dalam hal baku mutu air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) belum atau tidak ditetapkan, berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini sebagai baku mutu air.”

Untuk Sungai Serayu, pada pemantauan tahun ini, parameter yang diujikan baik di hulu maupun hilir menunjukkan hasil diatas baku mutu yang dipersyaratkan untuk parameter BOD, COD, Cu dan Klor Bebas. Pada Hulu sungai kadar BOD sebesar 13 mg/l, sedang di hilir sungai kadar BOD sebesar 12 mg/l (baku mutu : 3 mg/l). Kadar COD sebesar 26 mg/l (baku mutu : 25 mg/l), sedang di hilir sungai kadar COD masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Kadar klor bebas di hulu sungai sebesar 1,47 mg/l, sedang di hilir sungai sebesar 0,08 mg/l (baku mutu 0,03 mg/l). Kadar Cu di hulu sungai sebesar 0,16 mg/l, sedang di hilir sungai sebesar 0,12 mg/l (baku mutu 0,02 mg/l).

Hal ini menunjukkan bahwa adanya aktifitas penduduk sekitar yang membuang limbah domestik ke sungai serayu serta adanya penambangan pasir batu turut mempengaruhi kualitas air di sungai serayu.

Untuk Sungai Klawing, pada pemantauan tahun ini, semua parameter yang diujikan baik di hulu maupun hilir masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, kecuali untuk parameter BOD dan klor bebas. Pada Hulu sungai kadar BOD sebesar 10 mg/l, sedang di hilir sungai kadar BOD sebesar 10 mg/l (baku mutu : 3 mg/l). Untuk kadar klor bebas di hulu sungai sebesar 0,10 mg/l, sedang di hilir sungai sebesar 0,05 mg/l (baku mutu 0,03 mg/l).

Untuk Sungai Pekacangan, parameter yang diujikan baik di hulu maupun hilir menunjukkan hasil diatas baku mutu yang dipersyaratkan untuk parameter BOD, Cu dan Klor Bebas. Pada Hulu sungai kadar BOD sebesar 16 mg/l, sedang di hilir sungai kadar BOD sebesar 8 mg/l (baku mutu : 3 mg/l. Kadar klor bebas di hulu sungai sebesar 0,07 mg/l, sedang di hilir sungai sebesar 0,05 mg/l (baku mutu 0,03 mg/l). Kadar Cu di hulu sungai sebesar 0,15 mg/l, sedang di hilir sungai sebesar 0,065 mg/l (baku mutu 0,02 mg/l).

Pada hulu sungai pekacangan, nilai BOD yang tinggi bisa diakibatkan dari aktifitas pabrik aci/tapioka yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah dan membuang limbahnya di sungai pekacangan tanpa melakukan proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga turut mempengaruhi kualitas lingkungan perairan di wilayah tersebut utamanya mengakibatkan kadar BOD yang cenderung tinggi.

Untuk Sungai Larangan, pada pemantauan tahun ini, semua parameter yang diujikan baik di hulu maupun hilir masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, kecuali untuk parameter BOD dan klor bebas. Pada Hulu sungai kadar BOD sebesar 8 mg/l, sedang di hilir sungai kadar BOD sebesar 11 mg/l (baku mutu : 3 mg/l). Untuk kadar klor bebas di hulu sungai sebesar 0,05 mg/l, sedang di hilir sungai sebesar 0,06 mg/l (baku mutu 0,03 mg/l).

Untuk Sungai Gringsing, parameter yang diujikan baik di hulu maupun hilir menunjukkan hasil diatas baku mutu yang dipersyaratkan

untuk parameter BOD, tembaga dan Klor Bebas. Pada Hulu sungai kadar BOD sebesar 8 mg/l, sedang di hilir sungai kadar BOD sebesar 14 mg/l (baku mutu : 3 mg/l. Kadar klor bebas di hulu sungai sebesar 0,04 mg/l, sedang di hilir sungai sebesar 0,07 mg/l (baku mutu 0,03 mg/l). Kadar Cu di hulu sungai sebesar 0,04 mg/l, sedang di hilir sungai sebesar 0,07 mg/l (baku mutu 0,02 mg/l).

Untuk Sungai Gemuruh, pada pemantauan tahun ini, semua parameter yang diujikan baik di hulu maupun hilir masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, kecuali untuk parameter BOD dan klor bebas. Pada Hulu sungai kadar BOD sebesar 10 mg/l, sedang di hilir sungai kadar BOD sebesar 4 mg/l (baku mutu : 3 mg/l). Untuk kadar klor bebas di hulu sungai sebesar 0,07 mg/l, sedang di hilir sungai sebesar 0,05 mg/l (baku mutu 0,03 mg/l).

Untuk Sungai Ranu, hasil menunjukkan kadar diatas ambang batas untuk parameter BOD, Cu, dan klor bebas. Kadar BOD sebesar 4 mg/l (baku mutu : 3 mg/l), Kadar klor bebas adalah sebesar 0,07 mg/l (baku mutu : 0,03 mg/l). Kadar Cu adalah sebesar 0,05 mg/l (baku mutu : 0,02 mg/l).

Untuk Sungai Cideng, hasil menunjukkan kadar diatas ambang batas untuk parameter BOD, Cu, dan klor bebas. Kadar BOD sebesar 14 mg/l (baku mutu : 6 mg/l), Kadar klor bebas adalah sebesar 0,10 mg/l (baku mutu : 0,03 mg/l). Sedang kadar Cu adalah sebesar 0,04 mg/l (baku mutu : 0,02 mg/l). Nilai BOD yang diatas ambang batas yang ditetapkan diakibatkan adanya aktifitas industri kecil tahu di wilayah Desa Gandasuli, kecamatan bobotsari, yang menghasilkan limbah hasil rebusan kedelai dan membuangnya di sungai, sehingga mempengaruhi kualitas air di sungai tersebut.

Secara umum, aktifitas kegiatan industri dan limbah domestik dari penduduk sekitar di wilayah aliran sungai, memberikan andil yang besar terhadap kualitas lingkungan perairan. Sungai dijadikan sebagai badan air tempat pembuangan limbah dari hasil produksi industri yang berada disekitarnya. Daya tampung dan daya dukung sungai akan sangat mempengaruhi kemampuan sungai untuk mereduksi beban pencemar dari aktifitas industri maupun limbah domestik dari penduduk sekitar.

Hasil pemantauan terhadap kualitas perairan sungai dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 pada 14 (empat belas) titik pantau di 8 (delapan) sungai.

b) Pemantauan Kualitas Limbah Cair Industri

Untuk mendukung data dan analisa kualitas lingkungan, khususnya lingkungan perairan di Kabupaten Purbalingga, diperlukan adanya pemantauan air limbah terutama air limbah yang berasal dari kegiatan industri. Hal ini penting mengingat kegiatan industri memberikan kontribusi yang besar terhadap kualitas lingkungan perairan (air sungai) yang disebabkan masih banyak industri yang belum peduli terhadap lingkungan dengan membuang limbah tanpa proses pengolahan lebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kegiatan industri yang dipantau dalam kegiatan pemantauan tahun 2015 di Kabupaten Purbalingga meliputi : industri rambut palsu, yaitu: PT. Royal Korindah, PT. Indokores Sahabat, PT. Sung Shim International, PT. Hyup Sung Indonesia, PT. Boyang Industrial, dan PT. Sinhan Creatindo (6 lokasi), industri air minum dalam kemasan (AMDK), yaitu: PT. Tirta Purbalingga Adi Jaya, dan PT. Tirta Agung Wijaya (2 lokasi), industri soun, yaitu: PS Kancil Mas, di Desa Munjul Kecamatan Kutasari, dan PS Pandusari 2, di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari (2 lokasi), industri tapioka, yaitu: PA Bangkit, di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong, dan PA 55 Wanakusuma, di Desa Timbang Kecamatan Kejobong (2 lokasi), industri tahu, yaitu: Industri kecil tahu Desa Selanegara, Industri tahu Desa Gandasuli, dan Industri Tahu Desa Kalikabong (3 lokasi), dan obyek wisata air Bojongsari (1 titik sampel).

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap air limbah dari kegiatan industri, beberapa industri rambut palsu, industri tapioka, industri kecil tahu, serta industri soun yang tidak memiliki IPAL menunjukkan kadar BOD dan COD yang berada diatas normal. Bahkan pada industri tapioka justru menunjukkan hasil yang jauh diatas baku mutu. Sebaliknya industri yang telah memiliki IPAL cenderung menunjukkan hasil yang baik (dalam batas normal), walaupun terdapat

industri yang memiliki IPAL tetapi masih menunjukkan hasil uji diatas baku mutu.

Sebagian industri hanya memiliki IPAL yang sederhana, dan hanya sebagian kecil yang memiliki IPAL yang dapat menurunkan kadar limbah yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap kelompok objek pemantauan tersebut menunjukkan adanya beberapa parameter fisik dan kimia yang melampaui kadar maksimal yang dipersyaratkan. Merujuk hasil uji tersebut, pemerintah kabupaten, melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan pengawasan lebih lanjut kepada penanggung jawab kegiatan usaha/industri dengan memberikan rekomendasi untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran air, antara lain melalui: aspek dokumentasi lingkungan dan administrasi perizinan, aspek operasional administrasi lingkungan rutin, aspek teknis pengelolaan limbah.

Pada tahun 2015 target Kabupaten Purbalingga untuk jenis pelayanan Pencegahan Pencemaran Air adalah 100%, sementara untuk capaian realisasinya adalah 100%. Lokasi kegiatan yang menjadi objek pemantauan yang dilakukan oleh tenaga laboran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga meliputi 30 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga. Ke-30 lokasi pemantauan tersebut dikelompokkan menjadi 2 objek pemantauan yaitu, air sungai di 14 lokasi dan limbah cair yang disebabkan oleh aktifitas industri yang keluar dari proses produksi baik melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah atau tidak, sebelum memasuki badan air di 16 perusahaan industri. Target pengawasan pada tahun 2015 adalah 30 lokasi. Perhitungan realisasinya adalah $(30/30) \times 100\%$.

2) UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

Keberadaan Industri di Kabupaten Purbalingga berpengaruh besar terhadap kondisi kualitas udara. Udara merupakan komponen lingkungan penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan penggunaannya tidak bisa dibatasi oleh ruang ataupun pembatas tertentu, karena sebarannya tidak bisa dibatasi dan penggunaannya adalah penting terkait dengan unsur

kehidupan semua makhluk hidup. Untuk itu, menjaga kualitas udara menjadi suatu kebutuhan agar masyarakat dan makhluk hidup lainnya tidak terganggu kesehatannya akibat udara yang tercemar. Pentingnya udara yang sehat tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan pemantauan kualitas udara, baik uji udara ambien maupun emisi.

Tujuan dilakukannya Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 adalah antara lain untuk mengetahui kualitas dan potensi dampak pencemaran udara yang dibuang ke lingkungan oleh pelaku industri dengan pengukuran beberapa parameter. Adapun kegunaan dilaksanakannya kegiatan Pemantauan Kualitas Udara ini adalah sebagai bagian dari upaya mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi lingkungan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan penegakan hukum yang berkorelasi positif dengan pelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Berikut ini hasil pemantauan berdasarkan uji laboratorium lingkungan terhadap 2 kelompok objek pemantauan, yaitu kualitas udara ambien, dan kualitas udara emisi dari sumber tidak bergerak aktivitas industri.

a) Kualitas Udara Ambien

1. Pengujian kualitas udara ambien di lokasi industri dilakukan di 5 (lima) titik pantau sebagai berikut :
 - a. Pabrik Kayu CV. Purbayasa, Desa Purbayasa Kec. Purbayasa
 - b. Pabrik Soun Pandusari, Desa Bojongsari Kec. Bojongsari
 - c. Pabrik Soun Gunung Sewu, Desa Beji Kec. Bojongsari
 - d. Pabrik Kayu PT. Majapura, Desa Majapura Kec. Bobotsari
 - e. Pabrik Aci Harum Bunga, Desa Cipawon Kec. Bukateja
2. Pengujian kualitas udara ambien di lokasi ruang publik dilakukan di 4 (empat) titik pantau sebagai berikut :
 - a. Terminal Purbalingga, Jl. A.Yani – Purbalingga
 - b. Terminal Bobotsari, Desa Bobotsari Kec. Bobotsari

c. Sub Terminal Jompo, Desa Jompo Kec. Kalimanah

d. Goa Lawa, Desa Siwarak Kec. Karangreja

b) Kualitas Udara Emisi

Objek kegiatan pemantauan ini adalah cerobong berbagai industri, yang terdiri dari: 1) PT. Kuda Terbang, 2) PS. Gunung Sewu, 3) PT. Majapura, 4) PT. Bima Nugraha, 5) PT. Karya Bhakti Manunggal, 6) CV. Dua Naga, 7) PT. Wana Makmur Sejahtera, 8) CV. SN Jaya Prima, dan 9) CV. Purbayasa.

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap objek pemantauan tersebut menunjukkan adanya beberapa parameter yang melampaui kadar maksimal yang dipersyaratkan. Merujuk hasil uji tersebut, pemerintah kabupaten, melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan pengawasan lebih lanjut kepada penanggung jawab kegiatan usaha/industri dengan memberikan rekomendasi untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran udara, antara lain melalui aspek operasional administrasi lingkungan rutin, aspek teknis untuk memperbaiki kualitas udara emisi.

Pada tahun 2015 realisasi target capaian SPM bidang lingkungan hidup Daerah Kabupaten Purbalingga untuk Jenis Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara adalah 100%, sementara untuk capaian realisasinya adalah 100%. Lokasi kegiatan yang menjadi obyek pemantauan meliputi 18 lokasi. Ke-18 lokasi pemantauan tersebut dikelompokkan menjadi 2 obyek pemantauan yaitu udara Ambien di 5 lokasi industri dan 4 ruang publik, dan udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak di 9 cerobong perusahaan. Target pengawasan pada tahun 2015 adalah 18 titik sampel. Perhitungan realisasinya adalah $(18/18) \times 100\%$.

3) UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN TANAH

Pengujian terhadap tanah untuk produksi biomassa belum bisa dilakukan di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut disebabkan infrastruktur dan SDM pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga belum memiliki kapasitas untuk melakukan penyusunan peta status kerusakan

tanah secara mandiri. Sementara, apabila diserahkan kepada konsultan untuk melakukan pekerjaan ini, biaya yang harus dialokasikan cukup besar..

Sasaran Kedua : Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam.

a. Terjaganya Keragaman Hayati (Biodiversity Index).

Realisasi capaian indikator kinerja Terjaganya keragaman hayati (biodiversity index) tahun 2015 sebesar 100% atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 100%. Ini dapat dicapai dengan menjaga keragaman hayati baik yang ada di hutan Negara maupun dilahan masyarakat dengan pelaksanaan program perlindungan sumber daya alam.

Tabel 3.112 Capaian indikator Terjaganya Keragaman Hayati (Biodiversity Index)
Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Terjaganya keragaman hayati (biodiversity index)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

b. Jumlah Kasus Pelanggaran Perusakan Lingkungan Hidup.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah kasus pelanggaran perusakan lingkungan hidup tahun 2015 sebesar 10 kasus dan diselesaikan semuanya atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 11 kasus. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah menurun tiap tahunnya.

Tabel 3.113 Capaian Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Perusakan Lingkungan Hidup Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Jumlah kasus pelanggaran perusakan lingkungan hidup	100%	100%	6/6 (100%)	11/11 (100%)	100%	10/10 (100%)	100%

Penegakan hukum yang dimaksud disini adalah penegakan hukum lingkungan yang berlaku di wilayah Kabupaten Purbalingga, baik berupa Perda mengenai pengelolaan lingkungan, maupun penegakan hukum yang lebih tinggi, yaitu dari provinsi ataupun undang-undang dan peraturan dari pusat mengenai pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk dapat menegakkan hukum lingkungan diperlukan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan penegak hukum / instansi yang bertanggung jawab dengan persoalan lingkungan pada waktu yang akan datang. Hal ini terjadi karena tanpa adanya aduan masalah lingkungan dari masyarakat, pemerintah tidak akan mengetahui dengan jelas persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi terutama yang menimpa masyarakat yang lokasinya jauh dari pusat.

Beberapa masalah lingkungan yang ditangani oleh pemerintah daerah sampai saat ini lebih banyak yang bersifat rutinitas, seperti gerakan penghijauan dan reboisasi terkait dengan menurunnya kualitas lingkungan di sekitar kawasan lindung, sedangkan permasalahan mengenai pelanggaran hukum lingkungan atau pencemaran lingkungan tidak begitu banyak ditangani karena memang sifatnya bukan berupa aduan, sehingga tanpa aduan dari masyarakat penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena dalam hal ini masyarakat juga berperan sebagai kontrol dalam penegakan hukum.

Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan, membuat masyarakat berontak dan mengadukan masalah yang terjadi terkait dengan ketidaknyamanan akan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka akibat adanya berbagai kegiatan usaha. Pada tahun 2015 terdapat 10 masalah lingkungan yang diadukan oleh masyarakat ke pemerintah kabupaten,

Cq. Badan Lingkungan Hidup. Permasalahan lingkungan yang diadukan adalah pencemaran udara, limbah cair, kebisingan, dan bau yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha. Di tahun 2015, target Kabupaten Purbalingga untuk jenis pelayanan Informasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup adalah 100%. Terdapat 10 pengaduan, dan realisasinya terdapat 10 pengaduan permasalahan lingkungan yang ditindaklanjuti.

Sasaran Ketiga : Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- a. Jumlah dan Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen Perencanaan Lingkungan (AMDAL, UKL, UPL).

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL) tahun 2015 adalah Amdal : 0 UKL/ UPL : 40 SPPL : 124 atau 100% dari target yang ditentukan. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.114 Capaian Indikator Jumlah dan Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen Perencanaan Lingkungan (AMDAL, UKL, UPL) Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL)	Amdal : 2 (100%) UKL/UPL : 75	Amdal : 2 (100%) UKL/UPL : 20 (100%)	Amdal : 0 UKL/UPL : 19 SPPL : 64	Amdal : 0 UKL/ UPL : 7 SPPL : 116	100%	Amdal : 0 UKL/ UPL : 40 SPPL : 124	100

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Berbagai jenis usaha, baik industri besar maupun kecil yang berkembang di Kabupaten Purbalingga perlu untuk dimonitor dan diawasi dari mulai pembangunan sampai dengan proses produksinya. Untuk itulah, maka setiap jenis usaha / industri dengan skala tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku diwajibkan untuk menyusun dokumen pengelolaan lingkungan, seperti AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Untuk AMDAL pada tahun 2015 tidak ada kegiatan yang wajib menyusun AMDAL, sehingga tidak ada rekomendasi AMDAL yang diterbitkan, sedangkan untuk UKL-UPL telah diterbitkan sebanyak 40 rekomendasi, dan SPPL sebanyak 124 rekomendasi. Salah satu tujuan dari rekomendasi penyusunan dokumen lingkungan ini adalah untuk mengetahui ketaatan pemilik kegiatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL maupun SPPL.

b. Meningkatnya Kelompok Peduli Lingkungan.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya kelompok peduli lingkungan tahun 2015 sebesar 17 Kelompok atau 114,8100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2014 yaitu 16 Organisasi. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.115 Capaian Indikator Meningkatnya Kelompok Peduli Lingkungan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Meningkatnya kelompok peduli lingkungan	5	3 LSM	13 Organisasi	16 Kelompok	17 Kelompok	17 Kelompok	100

Baik tidaknya kondisi lingkungan/persoalan lingkungan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama dari mulai masyarakat hingga sampai ke pemerintah. Peran serta masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan sebenarnya sangat besar, karena masyarakat itu sendirilah yang nantinya akan langsung merasakan akibat dari adanya perubahan-perubahan lingkungan. Beberapa kelompok peduli lingkungan dan LSM lingkungan sudah mulai tumbuh di Kabupaten Purbalingga, sehingga nantinya dapat dijadikan wadah untuk menampung aspirasi sebelum diteruskan ke pemerintah daerah.

Selain itu, keberadaan kelompok peduli lingkungan dan LSM lingkungan nantinya diharapkan dapat berperan aktif sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam merencanakan berbagai kebijakan dan program terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Sampai dengan tahun 2015 ada 17 kelompok peduli lingkungan terdiri dari 11 bank sampah, yaitu Bank Sampah di Kelurahan Purbalingga Lor, Purbalingga Kidul, Purbalingga Wetan, Bancar, Kembaran Kulon, Wirasana, Penambongan, Bojong, Desa Sumampir, Karangbanjar, Muntang, 3 LSM, yaitu LSM Mahardika, LSM Hidup, LSM Sarana Wana Lestari, dan Forum Purbalingga Bersih, Komunitas Hijau dan kelompok siswa pecinta alam. Kurangnya penghargaan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang diterima oleh masyarakat Purbalingga merupakan salah satu indikator dari rendahnya peranan masyarakat dalam mengelola dan merawat lingkungan. Untuk itulah, pemerintah daerah mencoba untuk menyelenggarakan penyuluhan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penyuluhan mengenai pengelolaan sampah, sehingga diharapkan nantinya peningkatan timbulan sampah yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat dapat ditanggulangi sejak dini.

c. Menurunnya Penggalian Tambang Tanpa Ijin.

Pertambangan untuk saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Maka dari itu, Kabupaten Purbalingga sudah tidak bisa memasang target.

Tabel 3.115 Capaian indikator Menurunnya Penggalian Tambang Tanpa Ijin Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya penggalian tambang tanpa ijin	Menurun	Menurun	Menurun 2,9% (25,65 ha)	Menurun 2,10% (23,55 ha)	-	-	-

d. Menurunnya Kasus Pencurian Kayu di Hutan.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kasus pencurian kayu di hutan tahun 2015 sebesar 100% atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 100%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah tidak ada kasus.

Tabel 3.116 Capaian indikator Menurunnya Kasus Pencurian Kayu di Hutan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2013	Realisasi 2012	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian %
Menurunnya kasus pencurian kayu di hutan	Menurun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.117 Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Tahun 2015.

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	
		Nilai	Kategori
1	2	3	4
1	Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.	81,213	Baik
2	Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien, serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal.	66,66	Cukup Baik
3	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.	90,28	Sangat Baik
4	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang	202,133	Sangat baik
5	Meningkatnya kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM).	100,6	Sangat Baik
6	Tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika sosial-ekonomi guna	100	Sangat Baik

	mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, serta meningkatkan akselerasi pembangunan.		
7	Terwujudnya kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatnya partisipasi politik rakyat, serta meningkatnya peran dan fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	93,48	Sangat Baik
8	Meningkatnya kualitas manusia secara umum	117,37	Sangat Baik
9	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga.	101,67	Sangat Baik
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	89,15	Sangat Baik
11	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	94,57	Sangat Baik
12	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	78,23	Baik
13	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi keluarga	160,85	Sangat Baik
14	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi, yang dicerminkan dengan meningkatnya kualitas intelektual; berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama; berkembangnya budaya baca tulis; meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial; serta berkembangnya semangat gotong royong sehingga dapat terwujud harmoni dan dinamika dalam kehidupan sosial.	119,43	Sangat baik

15	Semakin kokohnya jatidiri dan kepribadian masyarakat Purbalingga	127,55	Sangat Baik
16	Meningkatnya semangat dan wawasan kebangsaan	141,67	Sangat Baik
17	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan yang mampu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.	103,37	Sangat Baik
18	Semakin meningkat dan meratanya pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.	111,02	Sangat Baik
19	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing tinggi; terus meningkatnya peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi.	81,67	Baik
20	Meningkatnya investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing, yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan	114,52	Sangat Baik
21	Tersedianya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi	100	Sangat baik

22	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	102,34	Sangat Baik
23	Terpenuhinya pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berbagai aktivitas sosial ekonomi	98,64	Sangat berhasil
24	Terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern untuk mewujudkan masyarakat informasi.	99,09	Sangat Baik
25	Terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta pulihnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat	140,66	Sangat Baik
26	Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam.	100	Sangat Baik
27	Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.	100	Sangat Baik
		2.916,17 / 27 = 108	Sangat Baik

Tabel 3.118 Matrik Capaian Kinerja

Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
100,054	100,09	100,70	94,93	97,35	108

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dengan anggaran sebesar Rp 1.716.041.934.000,- (Satu trilyun tujuh ratus enam belas milyar empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) mengakomodir program dan kegiatan-kegiatan pada tahun 2015 dengan

mengedepankan skala prioritas, efisiensi dan efektifitas penggunaan input/ sumber daya.

Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut ini yang dikelompokkan menurut sasaran strategis yang hendak diwujudkan dan program yang dilaksanakan.

Tabel 3.119 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.	Program Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan	268.965.000	261.246.550	97,13%
		Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian	268.816.000	227.058.287	84,47%
		Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	1.386.519.000	1.079.048.000	77,82%
2	Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal	Program Penguatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	5.198.996.000	3.651.143.339	70,23%
		Program Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah di Daerah	816.800.000	748.625.900	91,65%
		Program Pembinaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan	627.824.000	596.523.600	95,01%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
		Desa			
3	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	770.110.000	649.308.030	84,31%
		Program Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.776.202.000	2.236.759.794	80,57%
		Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	465.243.000	436.972.140	93,92%
		Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah	512.918.000	387.696.686	75,59%
		Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah	633.403.000	595.651.050	94,04%
		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	84.829.281.000	74.325.389.810	87,62%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	898.650.000	798.993.664	88,91%
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	75.000.000	43.075.000	57,43%
		Program Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	486.270.000	484.054.000	99,54%
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	890.821.000	813.575.150	91,33%
		Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan	13.064.281.000	12.568.553.213	96,21%
		Program Pengembangan Wilayah	2.790.088.000	2.734.569.750	98,01%
4.	Meningkatnya ketenteraman dan	Program Peningkatan Keamanan,	2.708.028.000	2.509.842.000	92,68%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
	ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang	Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat			
		Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	20.000.000	19.826.250	99,13%
		Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah	192.628.000	144.608.658	75,07%
		Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	602.861.000	593.538.500	98,45%
5.	Meningkatnya kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM)	Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	172.745.000	167.751.500	97,11%
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	13.447.234.000	13.128.872.040	97,63%
		Program Penyusunan Produk	636.886.000		83,03%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
		Hukum serta Pembinaan dan Pelayanan Hukum		528.811.000	
7.	Terwujudnya kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatnya partisipasi politik rakyat, serta meningkatnya peran dan fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.116.306.000	2.279.122.121	73,14%
		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	10.637.590.000	10.281.822.600	96,66%
		Program Catur Tertib Pertanahan	2.347.860.000	912.557.660	38,87%
7.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga	Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB	54.070.000	54.069.900	100,00%
		Program Pemberdayaan Keluarga	236.717.000	235.755.650	99,59%
		Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan	1.631.455.000	1.610.156.891	98,69%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		Kepesertaan KB			
9.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	1.491.268.000	1.481.438.000	99,34%
		Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.340.353.000	4.064.251.103	76,10%
		Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan	9.375.706.000	5.741.533.830	61,24%
		Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	3.913.186.000	1.537.988.000	39,30%
		Program Kesehatan Matra	33.950.000	33.705.600	99,28%
		Program Pemantapan Fungsi Manajemen	12.675.355.000	11.648.911.932	91,90%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		Program Pengelolaan Obat Publik, Makanan, Minuman dan Perbekalan Farmasi	1.926.716.000	1.830.440.898	95,00%
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	144.730.000	137.664.900	95,12%
		Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut	247.800.000	244.105.000	98,51%
		Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	474.991.000	415.370.907	87,45%
		Program Peningkatan Pelayanan pada BLUD	92.263.529.000	70.310.751.162	76,21%
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	41.115.038.000	33.603.597.396	81,73%
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan	1.094.826.000	909.936.400	83,11%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
		Kelembagaan Masyarakat			
10.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Program Pendidikan Usia Dini	6.129.472.000	5.382.666.190	87,82%
		Program Pendidikan Dasar	46.914.591.000	32.515.665.729	69,31%
		Program Pendidikan Menengah	20.045.239.000	19.648.705.623	98,02%
		Program Pendidikan Non-Formal	808.734.000	301.886.000	37,33%
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	9.596.791.000	8.880.470.010	92,54%
11.	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	915.410.000	879.018.354	96,02%
12.	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan Penanganan Keluarga Miskin	2.760.792.000	2.668.667.368	96,66%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		Program Penanggulangan Bencana	5.092.750.000	4.505.297.294	88,46%
13.	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi, yang dicerminkan dengan meningkatnya kualitas intelektual; berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama; berkembangnya budaya baca tulis; meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial; serta berkembangnya semangat gotong royong sehingga dapat terwujud harmoni dan dinamika dalam kehidupan sosial	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	398.188.000	366.200.634	91,97%
		Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat	165.945.000	120.413.950	72,56%
		Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	924.561.000	912.732.110	98,72%
		Program Pembinaan Kehidupan Beragama	2.664.654.000	2.357.343.750	88,47%
14.	Semakin kokohnya jatidiri dan	Program Pelestarian dan	1.893.410.000	1.731.320.040	91,44%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	kepribadian masyarakat Purbalingga	Pengembangan Budaya Daerah			
		Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	193.300.000	182.173.000	94,24%
15.	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan yang mampu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.140.084.000	1.043.797.439	91,55%
16.	Semakin meningkat dan meratanya pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan	Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja	650.442.000	613.231.375	94,28%
		Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan	124.936.000	119.813.078	95,90%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
		Hubungan Industrial			
		Program Ketransmigrasian	104.419.000	75.717.800	72,51%
17.	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas	Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	1.934.877.000	1.922.331.580	99,35%
		Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	523.500.000	508.750.695	97,18%
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.572.232.000	1.381.069.844	87,84%
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Tanaman	18.744.954.000	1.333.494.542	7,11%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
		Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian	60.000.000	59.967.000	99,95%
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan	428.575.000	425.426.950	99,27%
		Program Kesehatan Masyarakat Veteriner	819.395.000	807.401.100	98,54%
		Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	1.163.249.000	6.000.000	0,52%
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk	2.009.589.000	1.929.559.000	96,02%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
		Perikanan			
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	230.416.000	229.217.700	99,48%
		Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM	820.502.000	672.599.205	81,97%
		Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.	379.860.000	361.617.730	95,20%
		Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi	231.415.000	230.051.300	99,41%
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	11.000.000	10.526.500	95,70%
		Program Peningkatan Efisiensi	16.247.293.000	9.209.244.492	56,68%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
		Perdagangan			
		Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	364.597.000	355.324.000	97,46%
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah	2.481.850.000	1.236.118.500	49,81%
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.127.693.000	1.569.118.285	73,75%
18.	Meningkatnya investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing, yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan	Program Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah serta Fasilitasi Investasi	48.409.000	36.712.000	75,84%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
19.	Tersedianya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	130.025.441.500	118.891.572.698	91,44%
		Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan	28.121.657.000	6.394.344.700	22,74%
		Program Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan	3.732.881.000	1.921.261.300	51,47%
20.	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman	Program Penataan Lingkungan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Sanitasi	7.034.996.000	5.850.100.102	83,16%
		Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.364.953.000	3.980.329.282	91,19%
		Program Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	1.181.454.000	919.881.800	77,86%
21.	Terpenuhinya pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan	Program Pendayagunaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	3.140.883.000	2.962.011.200	94,31%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
	rumah tangga dan berbagai aktivitas sosial ekonomi	dan Energi Alternatif			
22.	Terselenggaranya Pelayanan Telematika yang efisien dan modern untuk mewujudkan masyarakat informasi	Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	937.900.000	908.808.572	96,90%
		Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas	3.792.977.000	1.707.767.500	45,02%
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.443.215.000	2.852.246.687	82,84%
23.	Terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta pulihnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1.899.380.000	913.912.819	48,12%
24.	Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan keikhasan sumber daya alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	660.680.000	654.345.200	99,04%
		Program Penyediaan dan	125.500.000	51.480.000	41,02%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		penyempurnaan Data dan Informasi Daerah			
25.	Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup	Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam	1.751.135.000	345.827.674	19,75%
		Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Kehutanan	20.000.000	-	0,00%
		Program Kaji Terap Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	434.000.000	407.221.043	93,83%